

FINAL LAPORAN

KAJIAN KEBIJAKAN PRBBK DI INDONESIA

PETRASA WACANA



Australian Government

DAFTAR ISI

<u>Halaman Judul</u>	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR GAMBAR	3
DAFTAR TABEL	4
RINGKASAN	5
DAFTAR SINGKATAN	11
LATAR BELAKANG	12
METODOLOGI	15
PRBBK DI INDONESIA	17
1. PRBBK Adalah Sebuah Pendekatan dan Gerakan	17
2. Perjalanan PRBBK di Indonesia	20
KEBIJAKAN PRBBK DI INDONESIA	25
1. Kebijakan Operasional	28
2. Kebijakan Struktural	30
3. Data dan Informasi Program Berbasis Desa	35
KERTAS POSISI KEBIJAKAN/REKOMENDASI	40
1. Tata Kelola PRBBK : Kebijakan Operasional, Mekanisme Pendanaan dan Pelembagaan PRBBK	40
2. Model Ketangguhan, Strategi Perluasan, termasuk di dalamnya Replikasi, Modifikasi, Inovasi, dan Kolaborasi	41
3. Monitoring Evaluasi PRBBK di Indonesia : Kontrol Kualitas, Penguatan Grakan/Program PRBBK, Kemandirian dan Keberlanjutan	42
DAFTAR PUSTAKA	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skema alur kajian kebijakan PRBBK	16
Gambar 2. Konsep <i>Climate Smart Disaster Risk Management</i> (CSDRM) Sumber : Modifikasi dari Mitchell et al. (2010)	19
Gambar 3. Tahapan Periode PRBBK di Indonesia mulai dari kemunculan hingga sekarang	21
Gambar 4. Survey online tentang kebijakan program berbasis desa	26
Gambar 5. Hasil survey Integrasi program berbasis desa dengan PRBBK	26
Gambar 6. Kebijakan yang dibutuhkan dan factor pendukung untuk Mengimplementasikan Program berbasis desa	27
Gambar 7. Program berbasis desa yang didukung oleh kebijakan operasional dari K/L	28
Gambar 8. Sinergi kebijakan program berbasis desa	29
Gambar 9. Kebijakan struktural dalam perencanaan pembangunan daerah dan desa	30
Gambar 10. Hasil survey kebutuhan kebijakan program Ketangguhan Desa menjadi Program pembangunan desa	31
Gambar 11. Alur penyusunan RPJMDes yang dapat disinkronisasi dengan PRBBK	32
Gambar 12. Skema model sinergi kebijakan operasional dan kebijakan struktural dalam perencanaan pembangunan desa	34
Gambar 13. Pemetaan program PRBBK di Indonesia yang dilaksanakan oleh organisasi dan komunitas di Indonesia dalam pendataan yang dilaksanakan pada saat KN PRBBK XIV 2021	36
Gambar 14. Survey Ketersediaan dan kemudahan akses data dan informasi program-program berbasis desa	37
Gambar 15. Media yang paling mudah digunakan sebagai akses untuk mendapatkan data dan informasi	39
Gambar 16. Hasil survey tentang kebutuhan data dan informasi dan platform yang bisa digunakan untuk menyediakan data dan informasi PRBBK	39

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Singkatan	11
Tabel 2. Pemetaan jumlah program berbasis desa oleh Kemenko PMK, 2019	35

RINGKASAN

Indonesia adalah negara yang memiliki multi ancaman bencana, bahkan tidak sedikit penduduknya tinggal di kawasan rawan bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada tahun 2017 mencatat sebanyak 148,4 juta warga tinggal di daerah rawan gempa bumi, 5 juta di daerah rawan tsunami, 1,2 juta penduduk di daerah rawan erupsi gunung api, 63,7 juta jiwa di daerah rawan banjir, serta 40,9 juta jiwa tinggal di daerah rawan longsor. Kondisi ini menempatkan komunitas/masyarakat yang berada di Kawasan rawan bencana sebagai kelompok paling rentan. Sejarah pergerakan PRB di Indonesia tidak lepas dari silih bergantinya bencana yang terjadi di Indonesia. Di tingkat global, konsep berbasis komunitas dalam pengelolaan risiko bencana telah muncul sebagai alternatif penanganan bencana pada sekitar tahun 1980-an dan 1990-an. Di Indonesia sejarah perkembangan Pengurangan Risiko Bencana tidak lepas dari kemunculan gerakan-gerakan PRBBK di berbagai wilayah seperti Pengelolaan Risiko Bencana yang dilakukan oleh masyarakat Lereng Gunung Merapi pasca letusan/erupsi besar yang terjadi tahun 1994 di Turgo. Gerakan masyarakat terhadap upaya PRB muncul akibat adanya satu tujuan bersama untuk menghadapi ancaman bencana yang ada di sekitarnya, dari persamaan tujuan ini berkembang menjadi sebuah gerakan bersama dalam membangun kesiapsiagaan, memperkuat pengetahuan, siap dalam menghadapi masa tanggap darurat, dan dapat pulih Kembali pasca terkena dampak bencana.

Berbagai pembelajaran praktek baik telah dihasilkan dan menjadi pengetahuan baru yang telah membawa perubahan dan penguatan tata Kelola penanggulangan bencana di Indonesia antara lain adaptasi perubahan iklim, PRBBK yang inklusif, pengarusutamaan gender, mata penghidupan, UMKM Tangguh, anak-anak dan anak muda, keberlanjutan ekonomi, pandemi COVID-19 dan perlindungan sosial. Pelembagaan PRBBK dimulai sejak tahun 2005 dari program-program yang dilaksanakan oleh NGO dan INGO yang langsung mensasar kepada masyarakat di daerah rawan bencana telah dikembangkan sejak tahun 2005 melalui program-program PRBBK dan membangun ketangguhan masyarakat dengan berbagai isu yang diintegrasikan, dalam perjalanannya PRBBK mengalami proses pelembagaan oleh seluruh organisasi dimana hampir semua organisasi baik NGO/NGO yang bekerja di komunitas memiliki departemen di bidang PRB dan Humanitarian, dan menempatkan tenaga-tenaga ahli di bidang PRB dalam melaksanakan program-program di berbagai wilayah. Karena dilaksanakan sesuai dengan kondisi unik di masing-masing komunitas, metodologi PRBBK

pada dasarnya amat beragam. SIAP SIAGA mendukung Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan pemerintah daerah di 4 provinsi sasaran untuk melaksanakan kegiatan untuk mencapai hasil sebagai berikut:

1. Mengembangkan model Desa Tangguh Bencana berbasis kesejahteraan. Model Desa Tangguh Bencana Berbasis Kesejahteraan akan menggabungkan mata pencaharian, kesetaraan gender dan inklusi sosial, pengurangan risiko bencana, dan kelestarian lingkungan untuk dikembangkan dan diadopsi bersama oleh BNPB dengan kementerian/lembaga terkait lainnya untuk menunjukkan nilai tujuan kebijakan bersama dan pengelolaan dan implementasi kebijakan yang terintegrasi dan inklusif; dan
2. Meningkatkan strategi dan sistem ketahanan desa yang sesuai dengan konteks dan praktik lokal. Sistem ketahanan desa yang ditingkatkan bersifat inklusif, akuntabel, dan kontekstual dengan praktik lokal (seperti desa adat di Bali) yang mendukung penguatan sosial ekonomi khususnya untuk daerah tujuan wisata baru yang rawan/rentan terhadap bencana perubahan iklim. Semua ini mencakup kapasitas yang lebih baik untuk analisis dan evaluasi risiko bencana partisipatif di tingkat desa.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan dan peraturan yang berfokus pada efektivitasnya dalam mengatasi imperatif, kesenjangan, kejelasan, dan koherensi antara kebijakan dan peraturan serta pedoman yang berlaku, terutama yang dihasilkan program berbasis desa kementerian/lembaga yang dikembangkan di Indonesia untuk dapat memberikan rekomendasi atau sebagai kertas posisi dalam merancang peraturan dan/atau pedoman pendukung yang paling strategis khususnya yang akan meningkatkan dan memperkuat kejelasan dan koherensi kebijakan PRBBK di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penggabungan metodologi kualitatif dan kuantitatif berbasis online dan offline. Terdapat lima (5) metode utama yang digunakan di dalam studi ini antara lain : (1) Desk study, (2) Focus Group Discussion (FGD), (3) Survey online tentang PRBBK, (4) Wawancara semi terstruktur, dan (5) Sidang dan Pleno Konferensi Nasional PRBBK XIV 2021. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan partisipatif yang melibatkan 20 sub-region atau provinsi yang mewakili 9 region pulau di Indonesia (Sumatera, Jawa, Bali, NTB, NTT, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan Papua) dengan pendekatan kewilayahan melalui proses refleksi tentang PRBBK dan dinamikanya sesuai dengan kontek lokal yang melibatkan unsur pentahelix antara lain pemerintah, organisasi masyarakat sipil, universitas, lembaga usaha, dan media. Penelitian

ini memfokuskan pada bagaimana kebijakan baik di tingkat nasional sampai ke desa yang dapat mendukung praktek gerakan PRBBK di Indonesia berdasarkan hasil-hasil praktik baik yang dihasilkan oleh komunitas khususnya di Kawasan rawan bencana dalam membangun ketangguhan masyarakat.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas terkait dengan program berbasis desa peneliti melakukan survey online yang mencakup tiga isu antara lain (1) program berbasis desa, (2) kebijakan pendukungnya, dan (3) data dan informasi program berbasis desa di Indonesia yang melibatkan 174 responden yang mewakili pentahelix di seluruh Indonesia pada periode Agustus – September 2021 terdiri dari 76,2 responden laki-laki dan 23,78% responden perempuan. 90% responden menyatakan bahwa program berbasis desa yang dilaksanakan secara langsung dapat mendukung PRBBK di desa atau dapat menjadi bagian dalam upaya membangun ketangguhan desa, namun apakah program berbasis desa sudah terintegrasi dalam perencanaan pembangunan desa 46,26% menyatakan sudah terintegrasi, 34,69% belum terintegrasi dan 19,05 tidak tahu apakah program berbasis desa sudah diintegrasikan. Bentuk integrasi yang dapat dilakukan dalam program berbasis desa adalah kebijakan, pendanaan, berbagi sumberdaya, indikator capaian dan pelaksanaan program. Faktor pendukung yang memperkuat program berbasis desa disinergikan dalam membangun ketangguhan desa adalah (1) mengintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan desa, (2) peningkatan kapasitas pengetahuan dan kelembagaan di desa dan pemerintah daerah, (3) pendanaan program yang diatur dalam kebijakan daerah, (4) fasilitator dan pendamping desa, (5) ketersediaan data dan informasi PRBBK di desa, dan (6) masuk dalam program kerja OPD di daerah. Kebijakan PRBBK tertuang di dalam kebijakan strategis atau struktural dan kebijakan operasional yang sifatnya pendukung kebijakan yang ada untuk dapat diimplementasikan di tingkat desa, namun sesuai dengan kewenangan Kementerian/Lembaga tidak seharusnya mengimplementasikan program langsung di desa tapi menyerahkan ini kepada daerah yang memiliki otonomi sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah. Kebijakan operasional adalah kebijakan yang dikeluarkan untuk dapat menjadi paduan bagi struktur di bawahnya dalam mengimplementasikan program sesuai dengan kewenangannya. Program berbasis desa yang dilakukan oleh kementerian/lembaga sebagai pijakan hukum didasarkan atas peraturan Menteri terkait, dan ini kemudian di adopsi dan dijadikan rujukan bagi NGO, INGO, organisasi

masyarakat sipil, dan komunitas dalam melaksanakan program PRBBK yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun sebuah program, menentukan tujuan, output dan outcome serta bagaimana mengimplementasikan yang sesuai dengan indikator capaian. Kebijakan ini berisi tentang paduan, indikator, alat ukur pencapaian indikator yang menjadi guideline dalam melaksanakan sebuah program. Program berbasis desa yang dikembangkan oleh K/L menjadi acuan bagi daerah dan desa dalam pengembangan wilayah. Secara umum program berbasis desa sudah sangat didukung oleh kebijakan-kebijakan yang ada, namun kebijakan ini belum sinergi satu sama lainnya, terutama dalam perencanaan pembangunan desa. Dari hasil survey menunjukkan bahwa 54,9% responden menyatakan bahwa program berbasis desa belum sinergi, 24,7 % menyatakan tidak tahu, dan hanya 20,4% yang menyatakan bahwa program berbasis desa sudah sinergi ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung di atas. Program K/L dapat disinergikan apabila ada kebijakan pendukung yang secara struktural dapat memayungi, dari hasil survey menunjukkan kebutuhan untuk dapat mensinergikan program berbasis desa adalah (1) kebijakan lintas sektor atau lintas K/L yang saling mengisi dan memperkuat, (2) Alokasi anggaran di daerah dan desa, (3) Indikator kunci yang dapat diukur dan dapat mensinergikan indikator di setiap program, (4) Implementasi berfokus pada proses bukan hanya aktivitas, (5) lokasi program yang sama untuk penguatan di desa.

Kebijakan struktural adalah kebijakan strategis yang dapat menggerakkan semua komponen dari pusat dan daerah untuk dapat mengimpelentasikan perencanaan dan program untuk mencapai tujuan besar yang digariskan di dalam RPJM Nasional – Provinsi – Kabupaten/Kota sampai ke desa. Kebijakan ini bersifat mandatori dilaksanakan dalam satu sistem tata kelola pemerintahan. Kebijakan ini sangat berhubungan dengan Perencanaan, Anggaran, Program Strategis, dan Program kerja dari level tertinggi sampai ke bawah di tingkat desa. Secara kelembagaan PRBBK saat ini sudah memiliki payung kebijakan yang cukup kuat, namun Kembali ke prinsipnya gerakan PRBBK harus tetap menjadi gerakan akar rumput yang tumbuh dari komunitas lokal dalam membangun ketangguhan. Hasil dari evidence dan praktik baik program PRBBK di Indonesia saat ini telah berevolusi di berbagai sektor, yang terbaru adalah bagaimana komunitas dan desa beradaptasi dengan Pandemi COVID-19 dalam program-programnya. Pelembagaan PRBBK melalui kebijakan harus mengacu pada kebijakan strategis yang dapat memastikan program PRBBK di desa dapat menjadi program kerja dalam perencanaan pembangunan daerah. Pengawasan PRBBK masuk di dalam rencana pembangunan daerah harus dimulai dari memastikan tim yang bekerja dalam penyusunan

dokumen dan para pendamping desa yang memfasilitasi proses perencanaan desa memiliki pemahaman tentang PRBBK sehingga dapat dituangkan di dalam dokumen dalam bentuk sinkronisasi nomenklatur dalam kebijakan desa dan dilakukan pengawalan dalam proses memfasilitasi sampai dengan penetapan dokumen RPJMDes.

Program berbasis desa banyak dikontribusikan oleh K/L dan berbagai organisasi yang bergerak di isu pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan hasil pemetaan dari Kemenko PMK tahun 2019 telah terdata 5,077 desa telah diintervensi program berbasis desa, belum termasuk program-program yang diinisiasi langsung oleh desa atau program-program desa yang berkontribusi pada penanggulangan bencana di komunitas. Hasil survey menunjukkan bahwa masyarakat tidak bisa mendapatkan data dan informasi tentang program-program berbasis desa yang relevan dengan PRBBK. 67,1% menyatakan tidak tersedianya data dan informasi program berbasis desa, 32,9 % menyatakan dapat mengakses data dan informasi, pada umumnya adalah para pelaku program yang terhubung dengan pemerintah daerah, universitas dan NGO/INGO yang memang memiliki basis program di desa. 68% responden menyatakan Data dan Informasi program berbasis desa susah diakses, dan 31,6% menyatakan dapat diakses. Data dan informasi yang sangat dibutuhkan adalah nama program, lokasi program, hasil pelaksanaan program, nama fasilitator, dan durasi lamanya waktu program. Data ini sangat dibutuhkan untuk mengetahui mana wilayah-wilayah yang masuk di dalam Kawasan rawan bencana belum dilaksanakan program. Bentuk data dan informasi yang dibutuhkan kebanyakan responden menyatakan butuh ada dashboard visualisasi data dan informasi, informasi dapat diakses di media sosial dan website. Selain itu juga ada yang menyarankan adanya form pendataan yang dapat digunakan oleh desa atau komunitas yang bisa mengupdate secara langsung data program berbasis desa. Direktori PRBBK juga dibutuhkan untuk dapat mengetahui pelaku PRBBK baik organisasi atau komunitas yang melaksanakan program-program PRBBK, selain itu dengan mekanisme komunikasi yang masif perlu mengembangkan model chatboat untuk dapat mendesiminasikan data dan informasi PRBBK di Indonesia melalui whatsapp, telegram, sms yang dapat terhubung dengan database PRBBK Indonesia.

Melalui proses refleksi di 19 wilayah, dari 20 wilayah yang berkontribusi, 3 sidang pleno, dan 15 diskusi tematik PRBBK dalam KN PRBBK XIV 2021, yang melibatkan secara akumulatif lebih dari 8,000 peserta dari seluruh wilayah Indonesia yang terdiri dari unsur masyarakat umum, komunitas, relawan, organisasi masyarakat sipil termasuk organisasi penyandang disabilitas, lembaga berbasis agama/keyakinan, pemerintah, entitas swasta, media massa, dan akademisi hasil temuan-temuan penelitian di 20 wilayah **mengemukakan kebutuhan untuk melakukan penguatan (1) Tata Kelola PRBBK: Kebijakan Operasional, Mekanisme Pendanaan, dan Pelembagaan PRBBK; (2)**

Model Ketangguhan, Strategi Perluasan termasuk di dalamnya replikasi, modifikasi, inovasi, dan kolaborasi; dan (3) Monitoring Evaluasi PRBBK di Indonesia: Kontrol Kualitas, Penguatan Gerakan/program PRBBK, Kemandirian dan Keberlanjutan agar terwujudnya kedaulatan, kebermanfaatan, kemandirian, keberlanjutan, dan penyebarluasan praktek-praktek PRBBK di Indonesia, khususnya wilayah yang rawan terhadap ancaman dan bencana.

DAFTAR SINGKATAN

BNPB	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BPBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Destana	Desa Tangguh Bencana
PRB	Pengurangan Risiko Bencana
FGD	<i>Focus Group Discussion</i> Diskusi Kelompok Terarah
PRBBK	Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas
KN PRBBK	Konferensi Nasional Pengelolaan Risiko Berbasis Komunitas
GPDRR	Global Platform for Disaster Risk Reduction
CBNRM	Community-Based Natural Resource Management
CBDRM	Community Based Disaster Risk Management
CSDRM	Climate Smart Disaster Risk Management
NGO	Non Government Organisation
INGO	International Non Government Organisation
UU	Undang-undang
PP	Peraturan Pemerintah
Perpres	Peraturan Presiden
Permen	Peraturan Menteri
UMKM	Usaha Menengah, Kecil dan Mikro
ESDM	Energi dan Sumberdaya Mineral
KLHK	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kemensos	Kementerian Sosial
Kementan	Kementerian Pertanian
Kemenparekraf	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Kemenko PMK	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional
K/L	Kementerian/Lembaga
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
SNI	Standart Nasional Indonesia
SPM	Standart Pelayanan Minimum

LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara yang memiliki multi ancaman bencana, bahkan tidak sedikit penduduknya tinggal di kawasan rawan bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada tahun 2017 mencatat sebanyak 148,4 juta warga tinggal di daerah rawan gempa bumi, 5 juta di daerah rawan tsunami, 1,2 juta penduduk di daerah rawan erupsi gunung api, 63,7 juta jiwa di daerah rawan banjir, serta 40,9 juta jiwa tinggal di daerah rawan longsor. Kondisi ini menempatkan komunitas/masyarakat yang berada di Kawasan rawan bencana sebagai kelompok paling rentan. Sejarah pergerakan PRB di Indonesia tidak lepas dari silih bergantinya bencana yang terjadi di Indonesia. Di tingkat global, konsep berbasis komunitas dalam pengelolaan risiko bencana telah muncul sebagai alternatif penanganan bencana pada sekitar tahun 1980-an dan 1990-an. Di Indonesia sejarah perkembangan Pengurangan Risiko Bencana tidak lepas dari kemunculan gerakan-gerakan PRBBK di berbagai wilayah seperti Pengelolaan Risiko Bencana yang dilakukan oleh masyarakat Lereng Gunung Merapi pasca letusan/erupsi besar yang terjadi tahun 1994 di Turgo. Gerakan masyarakat terhadap upaya PRB muncul akibat adanya satu tujuan bersama untuk menghadapi ancaman bencana yang ada di sekitarnya, dari persamaan tujuan ini berkembang menjadi sebuah gerakan bersama dalam membangun kesiapsiagaan, memperkuat pengetahuan, siap dalam menghadapi masa tanggap darurat, dan dapat pulih Kembali pasca terkena dampak bencana. PRBBK muncul dari adanya gerakan sosial terutama dari masyarakat yang hidup di Kawasan rawan bencana. Kemunculan gerakan PRBBK di Indonesia sejalan dengan perkembangan waktu yang dimulai dari periode kemunculan pada tahun 1996 – 1998 dimana gagasan PRB muncul yang diinisiasioleh prkatisi dan akademisi untuk memperbaiki praktek penanggulangan bencana yang lebih baik. Pada periode 1998 – 2006 merupakan periode Koalisi dimana gerakan PRB dan PRBBK sudah menjadi perhatian publik terutama pasca tahun 2004 setelah bencana tsunami Aceh, dimana program-program sudah mulai diorganisir melalui penyusunan tujuan dan membangun strategi gerakan dalam upaya menuju masyarakat tangguh. Pada periode tahun 2006 – 2008 gerakan PRB masuk pada periode birokratisasi dengan munculnya payung Hukum di Indonesia dengan lahirnya Undang-undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang memberikan semangat baru dalam upaya perbaikan penanganan bencana di Indonesia, kebijakan ini diperkuat dengan peraturan pelaksana sebagai turunannya antara lain PP No 21 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan

Penanggulangan Bencana, PP No 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing **Non** Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana, dan Perpres No 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Pada periode 2008 sampai sekarang adalah masuk dalam periode hasil, dimana pada periode ini PRBBK menemukan bentuk & kecenderungannya.

Pelembagaan PRBBK dimulai sejak tahun 2005 dari program-program yang dilaksanakan oleh NGO dan INGO yang langsung mensasar kepada masyarakat di daerah rawan bencana telah dikembangkan sejak tahun 2005 melalui program-program PRBBK dan membangun ketangguhan masyarakat dengan berbagai isu yang diintegrasikan, dalam perjalanannya PRBBK mengalami proses pelembagaan oleh seluruh organisasi dimana hampir semua organisasi baik NGO/NGO yang bekerja di komunitas memiliki departemen di bidang PRB dan Humanitarian, dan menempatkan tenaga-tenaga ahli di bidang PRB dalam melaksanakan program-program di berbagai wilayah. Karena dilaksanakan sesuai dengan kondisi unik di masing-masing komunitas, metodologi PRBBK pada dasarnya amat beragam. Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI), bersama dengan lembaga-lembaga pemerhati kebencanaan dan didukung oleh pemerintah, lembaga kemanusiaan nasional dan internasional, akademisi, pihak swasta dan komunitas telah menyelenggarakan telah 4 kali Simposium PRBBK sejak tahun 2004 dan 13 Kali Konferensi Nasional PRBBK sejak tahun 2009 sampai tahun 2021. Berbagai pembelajaran praktek baik telah dihasilkan dan menjadi pengetahuan baru yang telah membawa perubahan dan penguatan tata Kelola penanggulngn bencana di Indonesia antara lain adaptasi perubahan iklim, PRBBK yang inklusif, pengarusutamaan gender, mata penghidupan, UMKM Tangguh, anak-anak dan anak muda, keberlanjutan ekonomi, pandemi COVID-19 dan perlindungan sosial. Tahun 2012 Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui Perka BNPB No 2012 tentang Pedoman Desa Tangguh Bencana telah melembagakan PRBBK dan membagi ketangguhan masyarakat terhadap bencana ke dalam 20 Indikator Ketangguhan. Program Destana adalah program BNPB dan BPBD yang diadopsi dari program PRBBK yang dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia. Program PRBBK menjadi sangat masif pasca lahirnya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberi kewenangan kepada Desa dalam membangun dan mengembangkan Desa serta pengelolaan dana desa. Lebih dari 53,000 desa di Indonesia berada di daerah rawan bencana, berbagai program berbasis desa dari kementerian/lembaga telah digulirkan di

seluruh desa-desa di Indonesia antara lain Desa Tangguh Bencana (BNPB), Kampung Iklim (KLHK), Desa-desi dan Desa Siaga (Kementerian Kesehatan), Kampung Siaga Bencana (Kemensos), Desa Mandiri Pangan (Kementan), Desa Mandiri Energi (ESDM), Desa Siaga Pariwisata (Kementerian Pariwisata), Desa Pesisir Tangguh (Kementerian Kelautan dan Perikanan). Berbagai kebijakan telah dihasilkan di dalam memperkuat desa dari berbagai sektor, ini dapat menjadikan peluang bagi masyarakat untuk lebih mendapat penguatan dalam membangun ketangguhan terhadap bencana.

Sejak tahun 2020 Dunia dan Indonesia menghadapi Pandemi COVID-19, Selain ketidakpastian risiko pandemi COVID-19, berbagai ancaman bencana juga terjadi dalam masa pandemi ini. Selama 2020 saja tercatat sekurangnya 2.952¹ kejadian ancaman atau bencana di Indonesia baik yang berasosiasi terhadap krisis iklim maupun proses geologis. Kondisi tersebut semakin menambah tingkat risiko masyarakat yang hidup dalam kawasan rawan bencana, karena dalam waktu bersamaan harus terpapar ancaman pandemi maupun ancaman bencana lainnya dalam kurun waktu dua tahun ini. Untuk itu, upaya-upaya membangun ketahanan masyarakat terhadap risiko bencana dan perubahan iklim yang mengintegrasikan penguatan ekonomi dan perlindungan sosial juga esensial untuk mengurangi kerentanan masyarakat baik dalam jangka pendek maupun jangka Panjang.

Untuk menghasilkan output peningkatan efektivitas pendekatan ketahanan desa, Program SIAP SIAGA mendukung Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan pemerintah daerah di 4 provinsi sasaran untuk melaksanakan kegiatan untuk mencapai hasil sebagai berikut:

1. Mengembangkan model Desa Tangguh Bencana berbasis kesejahteraan. Model Desa Tangguh Bencana Berbasis Kesejahteraan akan menggabungkan mata pencaharian, kesetaraan gender dan inklusi sosial, pengurangan risiko bencana, dan kelestarian lingkungan untuk dikembangkan dan diadopsi bersama oleh BNPB dengan kementerian/lembaga terkait lainnya untuk menunjukkan nilai tujuan kebijakan bersama dan pengelolaan dan implementasi kebijakan yang terintegrasi dan inklusif; dan
2. Meningkatkan strategi dan sistem ketahanan desa yang sesuai dengan konteks dan praktik lokal. Sistem ketahanan desa yang ditingkatkan bersifat inklusif, akuntabel, dan

¹ BNPB 2020, Infografis Kejadian Bencana di Indonesia 2020

kontekstual dengan praktik lokal (seperti desa adat di Bali) yang mendukung penguatan sosial ekonomi khususnya untuk daerah tujuan wisata baru yang rawan/rentan terhadap bencana perubahan iklim. Semua ini mencakup kapasitas yang lebih baik untuk analisis dan evaluasi risiko bencana partisipatif di tingkat desa.

Dokumen ini disusun dengan tujuan untuk menganalisis kebijakan dan peraturan yang berfokus pada efektivitasnya dalam mengatasi imperatif, kesenjangan, kejelasan, dan koherensi antara kebijakan dan peraturan serta pedoman yang berlaku, terutama yang dihasilkan program berbasis desa kementerian/lembaga yang dikembangkan di Indonesia untuk dapat memberikan rekomendasi atau sebagai kertas posisi dalam merancang peraturan dan/atau pedoman pendukung yang paling strategis khususnya yang akan meningkatkan dan memperkuat kejelasan dan koherensi kebijakan PRBBK di Indonesia.

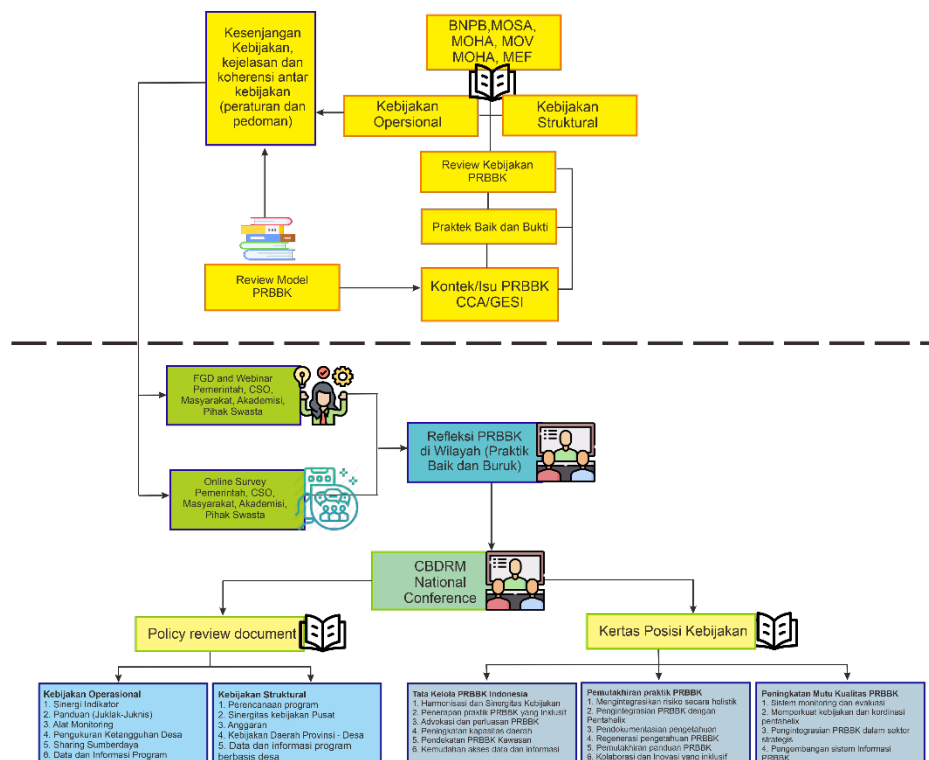
METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan penggabungan metodologi kualitatif dan kuantitatif berbasis online dan offline. Terdapat lima (5) metode utama yang digunakan di dalam studi ini antara lain :

1. **Desk Study** dilaksanakan untuk mereview semua dokumen-dokumen hasil penelitian, laporan, kebijakan yang relevan dengan tema studi terkait dan kebijakan tentang Penanggulangan Bencana dan turunannya, kebijakan program-program berbasis desa, hasil pembelajaran praktik baik dari program-program organisasi/lembaga baik pemerintah, akademisi, NGO/INGO dan komunitas.
2. **Focus Group Discussion (FGD)** dengan para pelaku PRBBK di Indonesia baik pemerintah, akademisi, NGO/INGO, Pihak Swasta, dan Komunitas. Kegiatan FGD dilaksanakan untuk menggali dinamika perkembangan PRBBK yang dapat merepresentasikan keanekaragaman wilayah yang mewakili 9 region pulau (Sumatera, Jawa, Bali, NTB, NTT, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua), melalui diskusi refleksi PRBBK untuk merefleksikan dan merenungkan kembali perjalanan PRBBK yang sudah dilaksanakan baik dalam sebuah program ataupun gerakan di komunitas untuk melihat kembali apa yang sudah baik dan apa yang masih menjadi gap yang harus diperbaiki, mulai dari tata kelola kebijakan, kelembagaan, inovasi, kemandirian, keberlanjutan, integrasi dengan

berbagai isu, program berbasis desa, data dan informasi, dan inklusifitas PRBBK yang dilaksanakan di 20 wilayah propinsi, sebagai bagian dari rangkaian acara Pra Konferensi Nasional Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas XIV 2021.

3. **Survey Online PRBBK** survey dilaksanakan selama 2 bulan secara online yang di share melalui media-media kebencanaan seperti whatsappgroup, twitter, instagram, dan Facebook. Survey online untuk memetakan persepsi tentang kebijakan dan program ketangguhan masyarakat dalam program berbasis desa, data dan informasi program ketangguhan desa di Indonesia.
4. **Wawancara Semi Terstruktur** dengan para pelaku PRBBK di indonesia yang merupakan aktor-aktor kunci dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, NGO/INGO, pihak swasta dan komunitas yang memiliki relevansi dalam berbagai isu pembangunan masyarakat/komunitas berdasarkan pengalaman dan praktik baik atau buruk yang sudah dilaksanakan ataupun yang belum dilaksanakan.
5. **Sidang Konferensi Nasional PRBBK XIV 2021** untuk menanalisis dan merumuskan temuan-temuan penting hasil sintesa awal berdasarkan temuan-temuan hasil refleksi-refleksi di daerah yang dihasilkan di 20 propinsi, hasil refleksi ini menjadi bahan dalam diskusi pada pelaksanaan sidang pleno selama empat (4) hari kegiatan KN PRBBK XIV 2021 dari tanggal 20 – 24 September 2021.



Gambar 1. Skema alur kajian kebijakan PRBBK

1. PRBBK Adalah Sebuah Pendekatan dan Gerakan

Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas menjadi sebuah pendekatan yang berfokus pada komunitas akar rumput, dalam mengelola risiko yang dihadapinya. Dalam siklus penanggulangan bencana menempatkan komunitas sebagai peran kunci dalam mengelola risiko baik dalam upaya pencegahan, mitigasi, tanggap darurat dan rehabilitasi atau rekonstruksi harus didasari oleh kebutuhan komunitas. Dalam perkembangannya secara global, sejak dikumandangkannya dekade internasional pengurangan bencana (International Decade for Natural Disaster Risk/IDNDR) yang kemudian dilanjutkan oleh strategi internasional pengurangan bencana (International Strategy for Disaster Reduction/ISDR), muncul istilah pengurangan risiko bencana (PRB) yang lebih memberikan pesan menguatkan penanggulangan bencana pada aspek antisipatif, preventif, dan mitigatif. Pada saat yang bersamaan terminologi-terminologi seperti Penanggulangan bencana tidak lagi populer dan menjadi bagian dari status quo.¹ Definisi UNISDR menjadi acuan otoritatif tentang makna PRB. Dalam kumpulan istilah yang diterbitkan tahun 2009, PRB didefinisikan sebagai konsep dan praktik mengurangi risiko bencana melalui upaya sistematis untuk menganalisa dan mengelola faktor-faktor penyebab dari bencana termasuk dengan dikurangnya paparan terhadap ancaman, penurunan kerentanan manusia dan properti, pengelolaan lahan dan lingkungan yang bijaksana, serta meningkatkan kesiapsiagaan terhadap kejadian yang merugikan.

Indonesia yang dihadapkan pada situasi yang tidak pasti karena berada di jalur pertemuan lempeng dan jalur cincin api, menjadikan 80% wilayah Indonesia berada di Kawasan rawan bencana. Selain persoalan bencana Indonesia juga dihadapkan pada krisis ekologi ditambah dengan ketidakpastian bencana dan dampak perubahan iklim yang meningkatkan La Nina dan El Nina di Indonesia. PRBBK didasari oleh “Pengelolaan bersama,” atau pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat, banyak digunakan di negara berkembang, dengan melibatkan pemangku kepentingan lokal dalam upaya yang dipimpin pemerintah untuk melindungi sumber daya lingkungan. Alat perumusan kebijakan baru dikembangkan untuk memberikan tanggapan yang lebih antisipatif dan partisipatif (Jordan dan Turnpenny 2015). Tata kelola lingkungan yang baik dapat dilihat dari partisipasi semua pihak dalam perencanaan dan pengambilan keputusan dalam menentukan kebijakan, melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan merupakan konsep Community-Based Natural Resource Management (CBNRM), dimana masyarakat punya akses dan kontrol terhadap sumberdaya alamnya. Inisiatif Pengelolaan

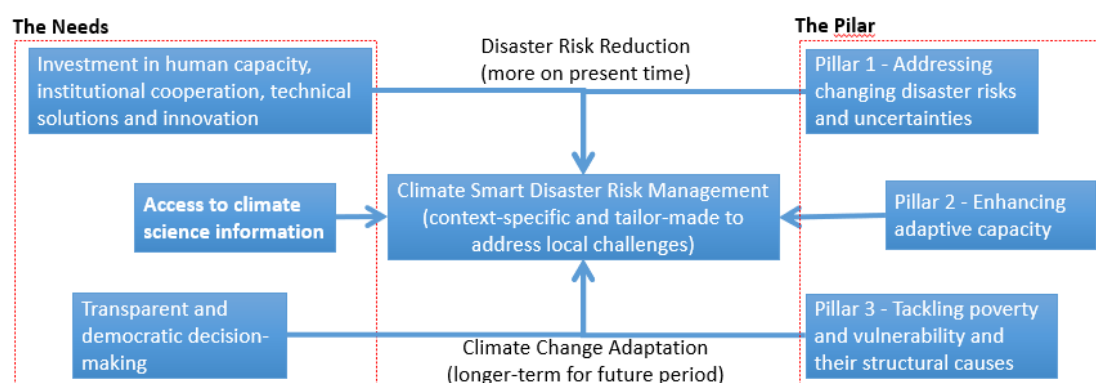
Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat bertujuan untuk mendukung masyarakat lokal yang hidupnya sangat bergantung pada sumber daya alam, seperti hutan dan keanekaragaman hayati, serta pada kondisi konservasi dan pemanfaatan yang berkelanjutan. Pendekatan-pendekatan berbasis komunitas mulai banyak digunakan baik dalam pengembangan program-program berbasis desa maupun kemunculan inisiatif komunitas karena menghadapi tekanan dan ancaman yang ada disekitarnya, sehingga perlu melakukan adaptasi.

Tata kelola PRBBK relevan dengan *Environment governance* yang mulai dikembangkan sejak awal 1980an dimana komunitas lokal yang terpapar akan risiko bencana akibat salah kelola lingkungan, menjadi aktor kunci dalam mewujudkan tata kelola yang baik dari bawah, dalam perkembangannya komunitas tidak bisa berdiri sendiri dalam mengelola risiko harus terhubung antara hulu dan hilir yang semua memiliki peran dan tanggung jawab yang sama yaitu upaya mengurangi risiko dari hulu ke hilir. Dalam pengelolaan Risiko Bencana tepat menggunakan pendekatan tata kelola berbasis kawasan (*landscape base approach*). Pendekatan lanskap telah menjadi mode dalam beberapa dekade terakhir. Berasal dari geografi lanskap abad kesembilan belas, popularitas yang diperbarui ini sejak 1980-an dipicu oleh perdebatan tentang konservasi alam, restorasi kawasan, jasa ekosistem, klaim yang bersaing atas tanah dan sumber daya alam, kebijakan penggunaan lahan sektoral, dan pembangunan berkelanjutan. *Landscape base approach* adalah strategi terintegrasi multifaset yang bertujuan untuk mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dari berbagai sektor untuk memberikan solusi di berbagai skala. Ini dapat didefinisikan secara luas sebagai kerangka kerja untuk mengatasi tantangan lingkungan, ekonomi, sosial dan politik yang semakin meluas dan kompleks yang biasanya melampaui batas-batas pengelolaan tradisional (Bas Arts, Marleen Buizer, et al, 2017). Pendekatan ini kemudian dikembangkan di dalam pengelolaan risiko bersama oleh komunitas.

Perubahan iklim adalah masalah global yang berdampak pada berbagai sektor termasuk human livelihood (penghidupan manusia) (Barnett, 2010). Perubahan iklim juga berdampak pada peningkatan kejadian bencana terkait iklim, menurut catatan BNPB kejadian bencana yang terjadi pada periode 2013 – 2020 sebanyak 1500 sampai lebih dari 2000 kejadian bencana setiap tahunnya, dan terus mengalami kenaikan, 90% kejadian bencana yang terjadi di Indonesia adalah bencana hidrometeorologi akibat perubahan iklim. Sejalan dengan target

pemerintah dalam manajemen risiko bencana, tahun 2009, Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR) mengadakan sebuah konvensi kebijakan di Stockholm, Sweden dengan tema 'Climate Smart Disaster Risk Management'. Forum tersebut mempertemukan para pakar iklim global dan bencana untuk mengembangkan pendekatan baru yang dinamakan Climate Smart Disaster Risk Management (CSDRM). CSDRM memberikan panduan mengenai perencanaan strategis, pengembangan program dan pembuatan kebijakan, yang digunakan sebagai penilaian pada efektivitas dari kebijakan Disaster Risk Management, proyek, dan program yang sudah ada dalam konteks perubahan iklim. Pendekatan CSDRM mempertimbangkan aksi pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim dalam merespon variabilitas iklim saat ini dan di masa depan. Tiga pilar utama dalam pendekatan CSDRM, yang kaitan utamanya dengan The Progression of Vulnerability dari akar masalah (Root causes) kepada kondisi yang tidak aman (unsafe conditions) (Wisner et al. 2004) dan berhubungan dengan ketahanan, kapasitas adaptif dan ketidakpastian (e.g. Holling 1973, Folke 2006). Tiga pilar tersebut adalah: (1) Mengatasi perubahan risiko bencana dan ketidakpastian, (2) Meningkatkan kapasitas adaptif, dan (3) Mengatasi kemiskinan, kerentanan dan penyebab strukturalnya.

Menurut Tom Mitchell (2010) seperti dalam Vincent dan Mambo (2017), konsep CSDRM adalah langkah awal untuk beradaptasi dengan perubahan iklim dan variabilitas dalam membantu pembuat kebijakan dengan langkah-langkah praktis untuk mengalokasikan sumber daya untuk mengurangi risiko saat ini dan masa depan di semua tingkatan, pendekatan berbasis bukti untuk memasukkan perubahan iklim ke dalam model pengurangan bencana saat ini. Berikut adalah gambaran dari konsep CSDRM:

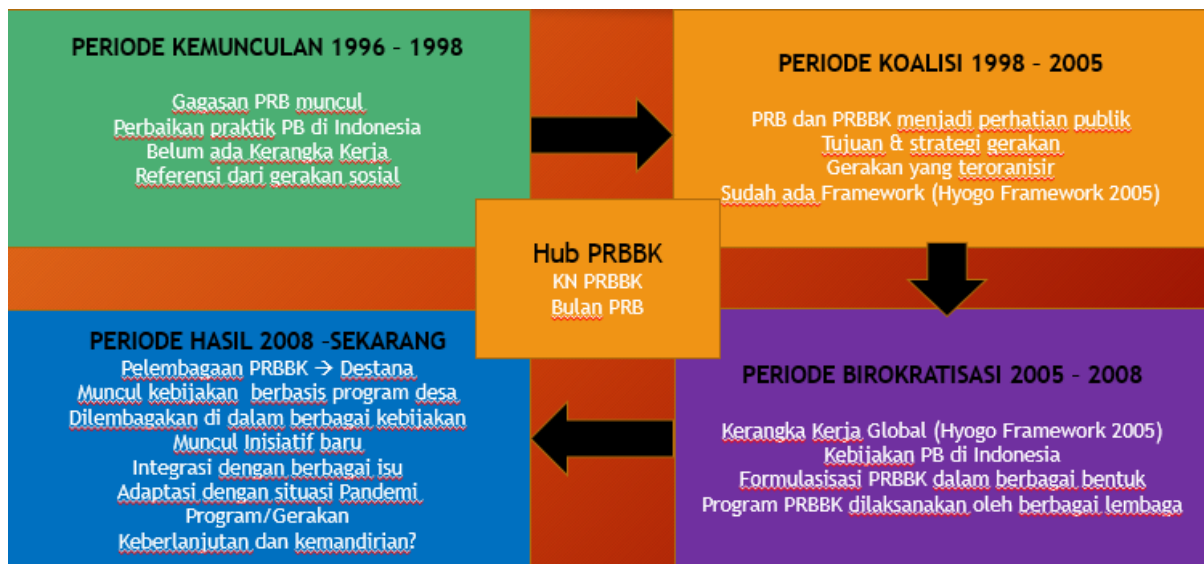


Gambar 2. Konsep *Climate Smart Disaster Risk Management* (CSDRM)
Sumber : Modifikasi dari Mitchell et al. (2010)

Metodologi PRBBK di Indonesia mengalami perkembangan selain adanya pengkayaan isu-isu lintas sektor yang masuk antara lain Perubahan Iklim, mata pencaharian (livelihood), kesehatan, sosial budaya, pertanian, gender, dan inklusi disabilitas dapat menjadikan pengkayaan bagi semua orang pada PRBBK untuk dapat terus berkembang, disisi lain masyarakat sudah semakin mandiri. Ragam metodologi tidak terdokumentasikan dan setiap organisasi memiliki cara tersendiri dalam mengelola data dan informasi, sehingga gerakan PRBBK belum sepenuhnya terdokumentasi dengan baik, namun upaya memperluas penerapan perspektif dan metodologi yang tepat juga mengilhami pelakunya untuk mendorong keterlibatan pemerintah melalui perumusan kebijakan, perencanaan program, dan penyusunan anggaran yang berpihak pada PRBBK, hal ini dapat dilihat dari banyaknya program-program berbasis desa yang pada dasarnya memiliki tujuan yang sama untuk membangun kemandirian dan ketangguhan desa dari berbagai isu yang dibawa yang harusnya bisa disinergikan.

2. Perjalanan PRBBK di Indonesia

Nugroho dan Men Yon, 2011 telah melakukan penelitian tentang PRBBK di Indonesia, dan membagi tahapan perjalanan PRBBK di Indonesia berdasarkan teori gerakan sosial Hulbert Blumer mengidentifikasi empat tahap gerakan sosial, yaitu “ketidakpuasan sosial (social ferment),” “antusiasme orang banyak (popular excitement),” “formalisasi (formalization),” dan “pelembagaan (institutionalization).” Namun saat ini tahapan gerakan sosial masih relevan dengan tahap perjalanan PRBBK di Indonesia. PRBBK membutuhkan sebuah hub yang dapat memetakan dan menjadi pusat pengetahuan perkembangan PRBBK yang dapat menjadi rujukan semua orang yang saat ini adalah kegiatan-kegiatan tahunan baik Simposium/konferensi Nasional Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas dan Bulan PRB yang diselenggarakan setiap bulan Oktober setiap tahunnya menjadi bagian dari Knowledge Hub PRBBK dan PRB di Indonesia



Gambar 3. Tahapan Periode PRBBK di Indonesia mulai dari kemunculan hingga sekarang

a. Periode Kemunculan

Kemunculan PRBBK di Indonesia diawali oleh munculnya gagasan PRB di dunia dan di Indonesia, pada tahun 1994, Kappala Indonesia bersama dengan masyarakat Dusun Turgo, Lereng Selatan Gunung Merapi pasca terjadi erupsi tahun 1994 memulai gagasan untuk membangun kesiapsiagaan masyarakat yang berada di Kawasan rawan bencana untuk mulai mengenali karakteristik ancaman Gunung Merapi, melakukan kajian risiko bencana secara partisipatif dan membangun sebuah mekanisme kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana Gunung Merapi. Upaya ini berhasil membangun pengetahuan dan kapasitas masyarakat dalam memobilisasi sumberdayanya untuk kesiapsiagaan bencana. Pada masa ini kemunculan PRBBK didasari oleh gerakan masyarakat yang berada di Kawasan rawan bencana, dimana pada periode kemunculan ada gap yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat dalam mengelola ancaman bencana, dimana pada saat itu perubahan paradigma belum menjadi hal baru.

Berangkat dari pembelajaran baik yang dimulai dari gerakan masyarakat, mulai muncul gagasan Pengurangan Risiko Bencana dari kalangan akademisi dan praktisi yang melihat di Indonesia belum ada kerangka kerja yang dapat digunakan, untuk menjembatani ini kemudian muncul gagasan untuk perbaikan praktik Penanggulangan Bencana (PB) di Indonesia. Gagasan ini kemudian dijadikan bahan-bahan diskusi akademisi dan praktis dan melibatkan beberapa komunitas yang intent dilaksanakan pada Periode 1996 – 1998.

b. Periode Koalisi

Pada periode ini PRB dan PRBBK sudah menjadi sebuah paradigma baru, dengan banyaknya kejadian bencana, namun di masa ini informasi tentang bencana masih sedikit, tidak banyak informasi yang didapatkan ketika suatu wilayah terkena bencana, PRB mulai menjadi perhatian publik, pendekatan PRBBK menjadi sebuah terobosan dalam pengembangan program-program berbasis komunitas. PRB sudah mulai terorganisir, dan sudah memiliki tujuan yang jelas dalam satu kerangka program. Sudah ada kesadaran global yang mulai muncul untuk menjadi perhatian bersama. Kejadian bencana Tsunami Aceh Tahun 2004 menjadi titik balik PRBBK yang memiliki sebuah kerangka kerja global yang diadopsi oleh semua negara termasuk Indonesia melalui Kerangka Kerja Hyogo 2005 – 2030. Pada periode ini bentuk peningkatan kapasitas komunitas dan organisasi menjadi wajib dalam pelaksanaan program-program berbasis di desa. Kebijakan PRBBK masih belum memiliki kekuatan bagi pemerintah dalam menjalankan program PRBBK, tapi pelembagaan PRBBK sudah terjadi di dalam program-program NGO/INGO dan donor mulai melihat pendekatan PRBBK adalah sebuah jawaban dalam upaya pengurangan risiko bencana di komunitas. Gerakan PRBBK yang mulai terorganisir muncul kepemimpinan dalam membangun strategi untuk mencapai tujuan bersama menjadikan masyarakat Tangguh, terutama masyarakat yang berada di Kawasan rawan bencana. Pasca tsunami Aceh, 90 persen program-program pembangunan masyarakat diarahkan kepada program PRB dengan berbagai model dan pendekatan, kebutuhan akan sumberdaya yang meningkat, pendampingan masyarakat yang cenderung diarahkan kepada Upaya PRB, dan mulai ada wadah untuk berbagi pengetahuan yang mengumpulkan para praktisi dan pelaku PRBBK diawali oleh Simposium Nasional Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) I, “Berbagi Pengalaman Tentang Pelaksanaan PRBBK”, dilaksanakan di Yogyakarta pada bulan Agustus 2004. Kegiatan ini dilengkapi dengan kunjungan lapangan ke Komunitas Merapi. Kegiatan ini didominasi oleh organisasi masyarakat sipil, akademisi dan komunitas. Dan sedikit keterlibatan pemerintah.

c. Periode Birokratisasi

Nugroho dan Men Yon, 2011 menyatakan tahap yang oleh Blumer disebut formalisasi ini menunjukkan tingkat pengorganisasian dan strategi koalisi gerakan yang semakin mapan. Gerakan sosial telah berhasil membangkitkan kesadaran hingga tingkat, di mana semua individu, kelompok, dan organisasi yang terlibat secara sukarela telah mengadopsi strategi yang sama. Pasca Tsunami Aceh 2004, yang

menjadi titik balik global dalam membangun Kerangka Kerja Hyogo Tahun 2005, masih menjadi pekerjaan rumah, bagi para praktisi dan akademisi dalam membangun kolaborasi dengan pemerintah untuk menata Penanggulangan Bencana Indonesia. Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia yang menginisiasi perbaikan Penanggulangan bencana di Indonesia telah berhasil menggabungkan berbagai pihak dan berbagai kepentingan untuk membangun consensus bersama menjadikan tata Kelola penanggulangan bencana Indonesia menjadi lebih baik, dengan mengusung lahirnya Undang-undang Penanggulangan Bencana yang sudah diinisiasi oleh masyarakat sipil sejak tahun 2001 dan sudah menjadi perhatian DPRRI, proses konsultasi public dilakukan dan pengawalan masyarakat sipil yang dilakukan menjadikan evidence PRBBK sebagai alat advokasi yang muncul dari komunitas-komunitas. Erupsi Letusan Gunungapi Merapi 2006 ke arah selatan, seakan menjadi ujian bagaimana PRBBK telah berhasil membangun kesiapsiagaan masyarakat Merapi, namun pada saat semua berfokus pada Gunung Merapi, terjadi bencana gempabumi pada tanggal 27 Mei 2006, yang menjadi titik balik percepatan perlu adanya Payung Hukum yang melembagakan PRBBK di Indonesia dan Pada April 2007 lahirlah Undang-undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menjadi Payung Hukum Penanggulangan Bencana di Indonesia dan diikuti dengan Peraturan turunannya melalui Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana dan melahirkan Kelembagaan Penanggulangan Bencana di Indonesia dengan lahirnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Lahirnya kebijakan Penanggulangan Bencana di Indonesia lebih memperkuat formulisasi PRBBK di Indonesia dalam berbagai bentuk dan isu yang dimainstreamingkan dan Pemerintah hadir sebagai pemegang mandate yang lebih besar dalam melindungi masyarakat di Kawasan rawan bencana, mulai banyak program PRBBK dalam berbagai bentuk yang dilakukan oleh lembaga, meningkatnya kebutuhan sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi tentang PRB, masifnya kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas tentang PRBBK yang dimotori oleh Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia, adanya kebutuhan kelembagaan PRB di daerah baik pemerintah, universitas, lembaga usaha, dan komunitas, di setiap organisasi yang memunculkan divisi baru di bidang PRB dan humanitarian di berbagai organisasi, dan program PRBBK menjadi masif dan mulai dikembangkan berbagai wilayah di Indonesia. Program-program PRBBK diintegrasikan dengan program PRB berbasis Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk melembagakan inisiasi PRBBK menjadi sebuah kebijakan di tingkat daerah, terutama untuk masyarakat yang berada di daerah rawan bencana.

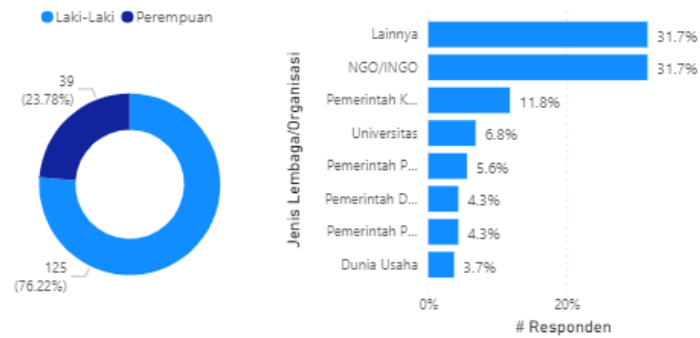
d. Periode Hasil 2008 - Sekarang

Periode hasil menjadi titik balik perkembangan PRBBK di Indonesia seperti Program PRBBK yang semula berfokus pada isu membangun ketangguhan komunitas terhadap bencana mulai berkembang dengan adanya isu-isu yang relevan, mulai ada pengintegrasian antara PRB dan Adaptasi Perubahan Iklim dalam kerangka Climate Smart Disaster Risk Managemant (CSDRM), isu pertanian adaptif, keberlanjutan penghidupan, perlindungan sosial dan ekonomi, inklusi disabilitas, gender mainstreaming dan yangterbaru adalah Pandemi COVID-19. Pada periode ini mainstreaming dalam berbagai isu telah dihasilkan dari evidence/praktik baik yang muncul dari perkembangan program PRBBK di Indonesia. Program PRBBK dengan keragaman isu kemudian dilembagakan di dalam program-program berbasis desa Kementerian/Lembaga. Mulai dari pelembagaan PRBBK menjadi Desa Tangguh Bencana (Destana) melalui Perka BNPB No 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Desa Tangguh Bencana. Sejak tahun 2012 sampai sekarang program Destana sudah dilaksanakan di 1.111 desa/kelurahan dan 541 Desa sudah diukur melalui Penilaian Ketangguhan Desa/Kelurahan (PKD) berdasarkan SNI : 8357-2017 Desa & Kelurahan Tangguh Bencana (2019), 350 desa/kelurahan sebagai Tangguh Pratama, 173 Tangguh Madya, dan 28 Tangguh Utama. Pada periode ini pelembagaan PRBBK tercermin di dalam program-program berbasis desa, sejak tahun 2011 Kementerian Sosial juga sudah mengembangkan program Kampung Siaga Bencana, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menjalankan program Desa Wisata Mandiri, Kementerian Kesehatan tahun 2010 mengembangkan program Desa dan Kelurahan Siaga Aktif, Tahun 2012 Kementerian Kelautan dan Perikanan juga melaksanakan program Desa Pesisir Tangguh, Tahun 2008 Kementerian ESDM melaksanakan program Desa Mandiri Energi, Tahun 2015 Kementerian Pertanian Mengembangkan Program Desa Mandiri Pangan, Tahun 2021 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaksanakan Program Kampung Iklim. Program berbasis desa ini bertujuan untuk membangun kemandirian masyarakat desa dan membangun ketangguhan masyarakat dari berbagai aspek. Program berbasis desa menjadi peluang dalam memperkuat sumberdaya di desa. Kemenko PMK tahun 2019 memetakan sebaran pelaku dan program berbasis desa yang relevan dengan PRBBK/Destana adalah sebanyak 5,077 desa yang sudah diintervensi baik dari Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, INGO, NGO dan komunitas, namun data dan informasi program berbasis desa belum terintegrasi dalam satu sistem.

Sejak lahirnya Undang-undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa, desa menjadi pusat pembangunan melalui perencanaan pembangunan desa yang diintegrasikan ke dalam semua sektor. Undang-undang desa makin memperkuat peran desa terutama yang berada di daerah rawan bencana dalam mengembangkan gerakan PRBBK di desa/kelurahan. Sejak tahun 2018 mitigasi dan penanganan bencana menjadi salah satu prioritas penggunaan dana desa sesuai dengan kewenangannya.

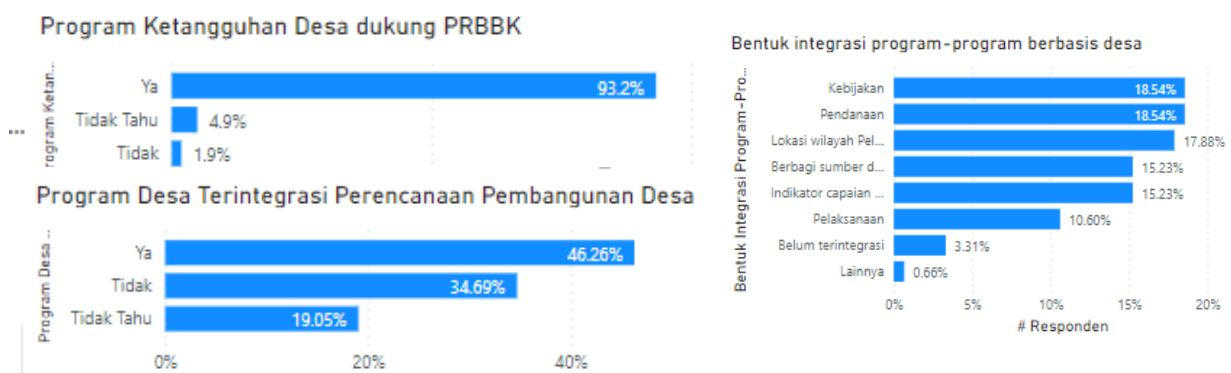
Dari segi kebijakan yang ada di Indonesia pasca lahirnya Undang-undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, tata Kelola Penanggulangan Bencana sudah memadai dan bahkan Indonesia menjadi salah satu champion di bidang kebencanaan yang diakui oleh dunia, ini tidak lepas dari peran serta semua pihak karena bencana menjadi urusan semua orang tanpa terkecuali dengan pendekatan kolaborasi Pentahelix antara pemerintah, universitas, media, lembaga usaha, dan masyarakat. UU No 6/2014 tentang desa seakan menjadi rujukan utama dalam mengimplementasikan program berbasis desa dan desa memiliki otonomi dan otoritas yang diberikan terutama dalam pembangunan desa, tapi ini tidak cukup perlu kebijakan yang dapat diturunkan sebagai operasional sehingga program berbasis desa dapat dilaksanakan dan dilembagakan dalam satu gerakan di desa yang di dukung oleh komunitas.

Dalam periode penelitian beberapa kegiatan pra KN PRBBK XIV 2021 dilaksanakan pada periode Agustus – September 2021, melalui refleksi PRBBK di 20 wilayah/provinsi yang merepresentasikan Sembilan (9) region yang mewakili keragaman konteks dan isu di seluruh pulau di Indonesia antara lain Sumatera, Jawa, Bali, NTB, NTT, Sulawesi, Kalimantan, Maluku dan Papua, ini selaras dengan Program Bappenas dalam RPJMN 2020 – 2024 melihat perspektif pembangunan berdasarkan karakteristik kewilayahan, dimana Kementerian/Lembaga didorong untuk pengembangan program berbasis kewilayahan sesuai dengan arakteristiknya melalui pemerintah daerah. Untuk mengetahui tingkat efektifitas terkait dengan program berbasis desa peneliti melakukan survey online yang mencakup tiga isu antara lain (1) program berbasis desa, (2) kebijakan pendukungnya, dan (3) data dan informasi program berbasis desa di Indonesia yang melibatkan 174 responden yang mewakili pentahelix di seluruh Indonesia pada periode Agustus – September 2021 terdiri dari 76,2 responden laki-laki dan 23,78% responden perempuan.



Gambar 4. Survey online tentang kebijakan program berbasis desa

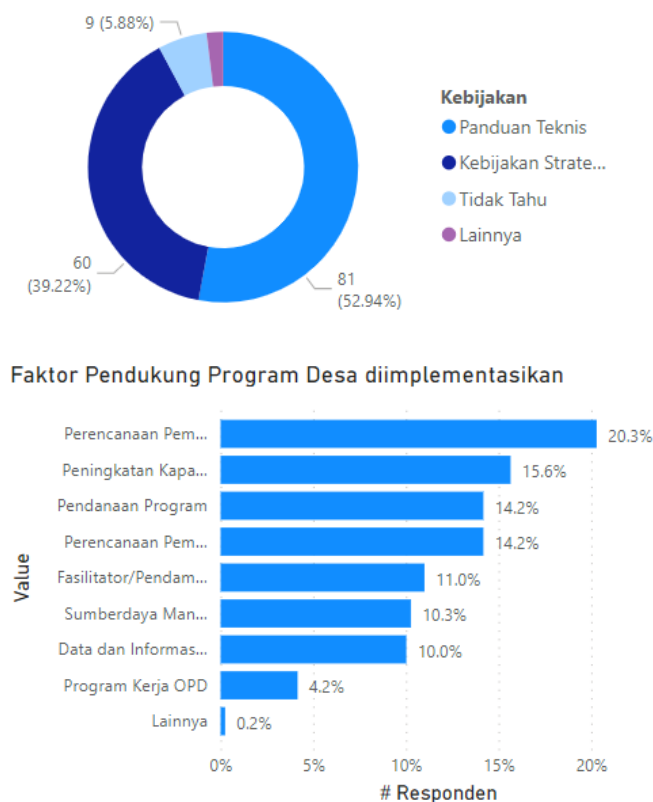
90% responden menyatakan bahwa program berbasis di desa yang dilaksanakan secara langsung dapat mendukung PRBBK di desa atau dapat menjadi bagian dalam upaya membangun ketangguhan desa, namun apakah program berbasis desa sudah terintegrasi dalam perencanaan pembangunan desa 46,26% menyatakan sudah terintegrasi, 34,69% belum terintegrasi dan 19,05 tidak tahu apakah program berbasis desa sudah diintegrasikan. Bentuk integrasi yang dapat dilakukan dalam program berbasis desa adalah kebijakan, pendanaan, berbagi sumberdaya, indikator capaian dan pelaksanaan program.



Gambar 5. Hasil survey Integrasi program berbasis desa dengan PRBBK

Program berbasis desa membutuhkan sinergitas untuk dapat menjadi tujuan bersama dalam penguatan desa dan komunitas, tidak sedikit program berbasis desa dimaknai pada sebatas aktifitas kegiatan yang diimplementasikan sesuai dengan panduan, mendorong keterlibatan, partisipasi beberapa kelompok di desa, tapi tidak mampu membangun sebuah gerakan di komunitas akar rumput. Beberapa evaluasi dari pelaksanaan program Destana di beberapa daerah yang dilaksanakan dalam 3 hari pelatihan, atau 1 minggu pelatihan dan pembentukan

kelembagaan secara formal sudah dianggap sebagai Destana tanpa ada proses pendampingan yang panjang, ini diserahkan kepada desa untuk memastikan keberlanjutan terjadi namun tidak sedikit ketika aparat desa memiliki kapasitas yang baik ini akan bisa menjadi peluang dalam pengembangan program di desa, tapi sebaliknya jika apparat pemerintah desa tidak memiliki kapasitas dibidang ini, bukan tidak mungkin PRBBK tidak menjadi perhatian. Kebijakan yang dibutuhkan dalam mengimplementasikan program berbasis desa adalah kebijakan yang strategis secara structural dapat memberikan kewenangan bagi daerah dan desa serta dilengkapi dengan paduan-paduan teknis yang dapat menjadi acuan. Berdasarkan hasil survey dan wawancara dengan responden kunci di daerah dan desa factor pendukung yang memperkuat program berbasis desa disinergikan dalam membangun ketangguhan desa adalah (1) mengintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan desa, (2) peningkatan kapasitas pengetahuan dan kelembagaan di desa dan pemerintah daerah, (3) pendanaan program yang diatur dalam kebijakan daerah, (4) fasilitator dan pendamping desa, (5) ketersediaan data dan informasi PRBBK di desa, dan (6) masuk dalam program kerja OPD di daerah.

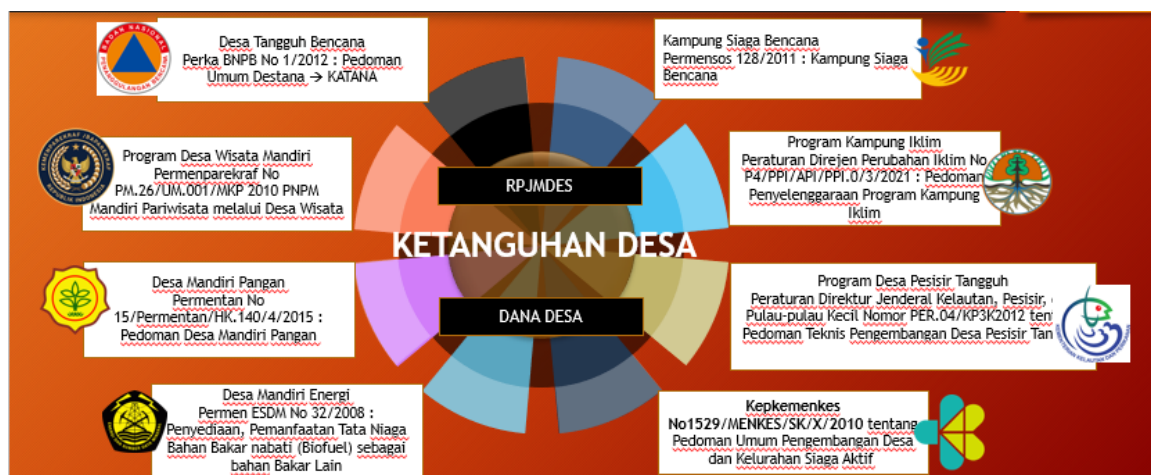


Gambar 6. Kebijakan yang dibutuhkan dan factor pendukung untuk Mengimplementasikan Program Berbasis Desa

Kebijakan PRBBK tertuang di dalam kebijakan strategis atau structural dan kebijakan operasional yang sifatnya pendukung kebijakan yang ada untuk dapat diimplementasikan di tingkat desa, namun sesuai dengan kewenangan Kementerian/Lembaga tidak seharusnya mengimplementasikan program langsung di desa tapi menyerahkan ini kepada daerah yang memiliki otonomi sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah.

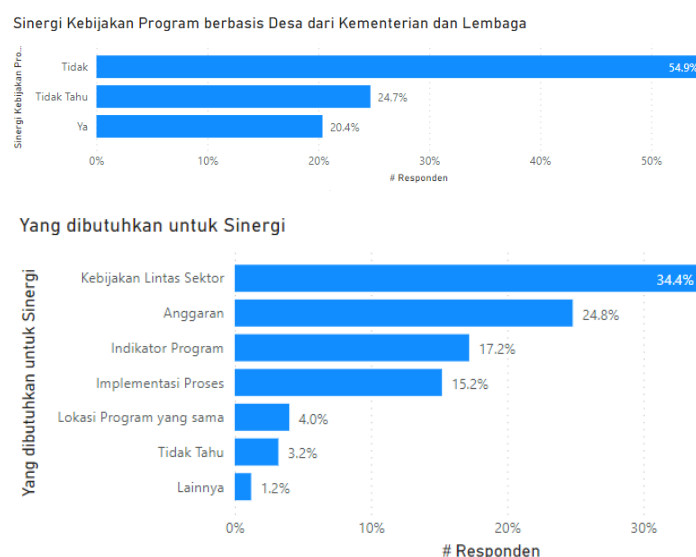
1. Kebijakan Operasional

Kebijakan operasional adalah kebijakan yang dikeluarkan untuk dapat menjadi paduan bagi struktur di bawahnya dalam mengimplementasikan program sesuai dengan kewenangannya. Program berbasis desa yang dilakukan oleh kementerian/lembaga sebagai pijakan hukum didasarkan atas peraturan Menteri terkait, dan ini kemudian di adopsi dan dijadikan rujukan bagi NGO, INGO, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas dalam melaksanakan program PRBBK yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun sebuah program, menentukan tujuan, output dan outcome serta bagaimana mengimplementasikan yang sesuai dengan indikator capaian. Kebijakan ini berisi tentang paduan, indikator, alat ukur pencapaian indikator yang menjadi guideline dalam melaksanakan sebuah program. Program berbasis desa yang dikembangkan oleh K/L menjadi acuan bagi daerah dan desa dalam pengembangan wilayah. Secara umum program berbasis desa sudah sangat didukung oleh kebijakan-kebijakan yang ada, namun kebijakan ini belum sinergi satu sama lainnya, terutama dalam perencanaan pembangunan desa.



Gambar 7. Program berbasis desa yang didukung oleh kebijakan operasional dari masing-masing K/L

Kebijakan di atas secara operasional dapat digunakan lintas kementerian/lembaga dan dapat digunakan oleh organisasi atau komunitas yang akan melaksanakan program sebagai acuan dan panduan, namun secara struktural kebijakan ini tidak mengikat kementerian/lembaga atau daerah untuk menjadi wajib digunakan yang memang berfungsi sebagai paduan yang diturunkan dalam petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana, hal ini mengakibatkan tantangan terbesarnya adalah bagaimana keberlanjutan program di tingkat daerah sampai ke desa dapat dipertahankan, namun disini lain ini dapat menjadi alat bantu dalam membangun gerakan PRBBK sesuai dengan prinsip PRBBK bahwa program adalah bagian faktor eksternal yang dapat menggerakkan komunitas. Untuk memperkuat desa sesuai dengan amanat UU No 6/2014 tentang Desa segala program berbasis desa harus terkoordinasi dan sinergi. Dari hasil survey menunjukkan bahwa 54,9% responden menyatakan bahwa program berbasis desa belum sinergi, 24,7 % menyatakan tidak tahu, dan hanya 20,4% yang menyatakan bahwa program berbasis desa sudah sinergi ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung di atas. Program K/L dapat disinergikan apabila ada kebijakan pendukung yang secara struktural dapat memayungi, dari hasil survey menunjukkan kebutuhan untuk dapat mensinergikan program berbasis desa adalah (1) kebijakan lintas sektor atau lintas K/L yang saling mengisi dan memperkuat, (2) Alokasi anggaran di daerah dan desa, (3) Indikator kunci yang dapat diukur dan dapat mensinergikan indikator di setiap program, (4) Implementasi berfokus pada proses bukan hanya aktivitas, (5) lokasi program yang sama untuk penguatan di desa.



Gambar 8. Sinergi kebijakan program berbasis desa

2. Kebijakan Struktural

Kebijakan struktural adalah kebijakan strategis yang dapat menggerakkan semua komponen dari pusat dan daerah untuk dapat mengimpelentasikan perencanaan dan program untuk mencapai tujuan besar yang digariskan di dalam RPJM Nasional – Provinsi – Kabupaten/Kota sampai ke desa. Kebijakan ini bersifat mandatori dilaksanakan dalam satu sistem tata kelola pemerintahan. Kebijakan ini sangat berhubungan dengan Perencanaan, Anggaran, Program Strategis, dan Program kerja dari level tertinggi sampai ke bawah di tingkat desa. Secara kelembagaan PRBBK saat ini sudah memiliki payung kebijakan yang cukup kuat, namun Kembali ke prinsipnya gerakan PRBBK harus tetap menjadi gerakan akar rumput yang tumbuh dari komunitas lokal dalam membangun ketangguhan. Hasil dari evidence dan praktik baik program PRBBK di Indonesia saat ini telah berevolusi di berbagai sektor, yang terbaru adalah bagaimana komunitas dan desa beradaptasi dengan Pandemi COVID-19 dalam program-programnya.

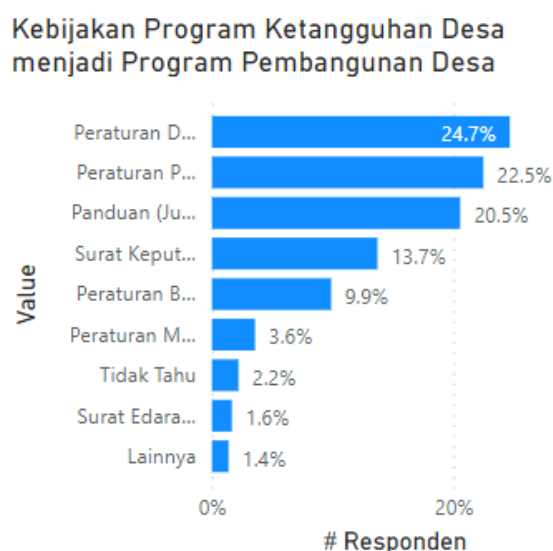


Gambar 9. Kebijakan struktural dalam perencanaan pembangunan daerah dan desa

Hasil diskusi Pleno yang merefleksikan PRBBK di 20 region/wilayah beberapa temuan penting adalah, pelembagaan PRBBK sudah difasilitasi oleh berbagai kebijakan pelaksana dalam bentuk panduan yang menjadikan program berbasis desa dapat diimplementasikan, namun persoalan mendasar adalah soal keberlanjutan yang diserahkan ke desa melalui kebijakan yang ada tidak sepenuhnya dapat dilakukan. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberlanjutan PRBBK adalah bukan dari sisi kebijakan tapi adalah (1) kapasitas penyelenggra pemerintah daerah dan desa, (2) belum sinerginya program-program berbasis desa, (3) program berbasis desa belum di akomodir di dalam kebijakan-kebijakan daerah seperti perda,

perturan walikota/bupati, dan kebijakan daerah lainnya yang dapat menjadi jembatan untuk memperkuat dalam program di daerah; (4) program-program berbasis desa K/L belum terakomodir di dalam perencanaan pembangunan daerah ataupun desa; (5) adanya aturan yang menjadi acuan yang berbeda nomenklatur sehingga tidak bisa terkomodasi dalam program wajib di daerah atau di desa.

Dalam perencanaan pembangunan, Daerah mengacu pada Permendagri 90/2018 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan diperkuat dengan Kepmendagri 50/2020 tentang Verifikasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sudah menentukan pembagian urusan wajib dan urusan pilihan, dengan nomenklatur yang sudah ditentukan, daerah diberi kewenangan untuk mengembangkan pada level sub program dan indikator program yang dapat menjadi ruang untuk mengintegrasikan isu lintas sektor , tetapi secara program besar sudah ditetapkan dan tidak dapat dirubah yang memberikan acuan daerah dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran di daerah, mengingat alokasi dana pusat kedaerah berkontribusi cukup besar dalam APBD dan APBDes. Dari hasil survey yang dilakukan, kebutuhan kebijakan di dalam memperkuat dan mensinergikan program berbasis desa dalam perencanaan pembangunan desa harus tercermin dalam perencanaan pembangunan daerah antara lain (1) Kebijakan daerah; (2) Peraturan Pemerintah yang dapat mengkordinasikan K/L; (3) Panduan (Juklak-Juknis); (4) Surat Keputusan kepala daerah; (5) peraturan bersama menteri yang dapat mengkordinasikan indikator-indikator kunci.



Gambar 10. Hasil survey kebutuhan kebijakan program Ketangguhan Desa menjadi Program Pembangunan Desa

Pelembagaan PRBBK melalui kebijakan harus mengacu pada kebijakan strategis yang dapat memastikan program PRBBK di desa dapat menjadi program kerja dalam perencanaan pembangunan daerah. Pengawasan PRBBK masuk di dalam rencana pembangunan daerah harus dimulai dari memastikan tim yang bekerja dalam penyusunan dokumen dan para pendamping desa yang memfasilitasi proses perencanaan desa memiliki pemahaman tentang PRBBK sehingga dapat dituangkan di dalam dokumen dalam bentuk sinkronisasi nomenklatur dalam kebijakan desa dan dilakukan pengawasan dalam proses memfasilitasi sampai dengan penetapan dokumen RPJMDes



Gambar 11. Alur penyusunan RPJMDes yang dapat disinkronisasi dengan PRBBK

Sejatinya PRBBK secara kelembagaan sudah dimaknai dalam perencanaan pembangunan desa, dimana hasil kajian risiko bencana adalah dasar bagi desa/kelurahan yang berada di kawasan rawan bencana menjadi pertimbangan dalam melakukan pengkajian desa. Hasil kajian ini menjadi dasar untuk membuat rencana aksi, jika rencana aksi ini dianggap penting dan wajib untuk diimplementasikan di dalam program desa maka secara skematik hasil-hasil rencana aksi masyarakat untuk PRB dan API perlu dipilih dalam konteks program Desa yang dapat dimasukkan di dalam program pembangunan desa. Secara struktural penggunaan dana desa sudah diatur dalam Permendagri 20/2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menjadi rujukan bagi Kabupten/Kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan UU No 23/2014 Tentang Pemerintah Daerah, telah secara tegas memasukkan Penanggulangan Bencana sebagai prioritas desa dalam alokasi anggaran belanja desa yang difasilitasi oleh

pemerintah daerah. Ada 5 bidang belanja yang diatur dalam penggunaan dana desa di daerah antara lain

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pelayanan masyarakat, dan administrasi desa lainnya
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang dapat disinkronisasi dengan mitigasi struktural dalam upaya PRB dan API, memberikan akses yang inklusif, memfasilitasi kemajuan infrastruktur dibidang ekonomi, wisata dan lain sebagainya
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa dapat disinkronisasi dengan penguatan kelembagaan desa dalam berbagai aspek termasuk bencana dan perubahan iklim, kelembagaan di bidang ekonomi, sosial masyarakat, dan lain sebagainya;
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dapat disinkronisasi dengan penguatan masyarakat baik dari aspek ekonomi, sosial, lingkungan dan budaya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa dapat disinergikan dengan kegiatan-kegiatan PRBBK di desa, membangun ketangguhan masyarakat desa, kesiapsiagaan desa, rencana kontijensi, sistem peringatan dini dan tanggap darurat bencana, serta pemulihan pasca bencana.

Perioritas Bidang di atas di perkuat di dalam berbagai Peraturan Menteri Desa dan Daerah Tertinggal setiap tahunnya yang memasukkan penanggulangan Bencana menjadi salah satu prioritas pembangunan desa. Permendes No 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022 mempertegas penggunaan dana desa untuk 3 hal antara lain (1) Pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan desa; (2) Program prioritas nasional sesuai dengan kewenangan desa; dan (3) Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam. Indikator program berbasis desa harus dapat menjawab kebutuhan desa sesuai dengan kewenangan daerah dan desa. Sehingga untuk dapat mensinergikan kebijakan yang ada perlu ada kebijakan perantara yang harus di dorong di daerah baik di Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan di Desa dalam bentuk peraturan daerah atau peraturan desa untuk dapat menyerap model-model ketangguhan sesuai dengan kewenangan dan karakteristik serta kebutuhan desa masing-masing.

Sinergi kebijakan melihat aspek operasional dalam program berbasis desa memiliki satu indikator kunci yang dapat disepakati dalam mengintegrasikan berbagai isu dalam

ketangguhan, ini dapat dimulai dari adanya baseline data ketangguhan yang melingkupi aspek pelayanan dasar, pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan, sistem penanggulangan bencana. Indikator kunci disusun berdasarkan indikator-indikator program berbasis desa yang dijadikan rujukan secara operasional dan teknis, namun dalam mengintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan daerah sampai ke desa, perlu dilakukan persandingan nomenklatur program yang diatur di dalam kebijakan-kebijakan strategis yang struktural sebagai kebijakan yang menjadi landasan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah dan desa melalui proses perencanaan yang dilakukan dari level komunitas, musyawarah dusun, musyawarah desa yang di bawa ke dalam proses musyawarah pembangunan daerah. Faktor yang dapat memperkuat sinergi kebijakan dalam program berbasis desa perlu melaksanakan suatu terobosan melalui kebijakan bersama lintas K/L di tingkat nasional yang dapat memberikan arahan dalam mensinergikan program berbasis desa, sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan bagi daerah dalam membuat kebijakan di tingkat daerah sampai dengan kebijakan di tingkat desa yang dapat mensinkronisasi antara kebutuhan operasional program dengan proses struktural dalam perencanaan pembangunan daerah sampai ke desa (Gambar 12).



Gambar 12. Skema model sinergi kebijakan operasional dan kebijakan struktural dalam perencanaan pembangunan desa

3. Data dan Informasi Program Berbasis Desa

Program berbasis desa banyak dikontribusikan oleh K/L dan berbagai organisasi yang bergerak di isu pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan hasil pemetaan dari Kemenko PMK tahun 2019 telah terdata 5,077 desa telah diintervensi program berbasis desa, belum termasuk program-program yang diinisiasi langsung oleh desa atau program-program desa yang berkontribusi pada penanggulangan bencana di komunitas.

Tabel 2. Pemetaan Jumlah Program Berbasis Desa oleh Kemenko PMK, 2019

No	Nama Pogram	Pelaku	Jumlah Desa
1	Desa Tangguh Bencana (Destana)	BNPB	626
2	Desa Tangguh Bencana (Destana)	BPBD	1,179
3	Kampung Siaga Bencana (KSB)	Kemensos	735
4	Program Kampung Iklim	KLHK	1,888
5	Desa Mandiri Iklim	Kementerrian Pertanian	67
6	Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT)	Kmeneterian Kelautan dan Perikanan	84
7	Desa Tangguh Bencana	Kementerian Desa	102
8	Desa Tangguh Bencana	NGO	106
9	Program Permata	PMI	125
10	KKN Tematik PRB	Universitas/FPTPRB	35
11	Citarum Harum	Kemenko PMK	17
TOTAL			5,077

Sumber : Kemenko PMK, 2019

Data dan informasi program berbasis desa yang mendukung PRBBK tidak secara keseluruhan dapat dipetakan, sejak dilembagakannya PRBBK di Indonesi banyak program-program yang sudah dilaksanakan oleh berbagai pihak, namun dalam perjalanannya lebih dari 15 tahun data dan informasi ini menjadi persoalan yang susah diakses. Dalam kajian ini dilakukan survey tentang data dan informasi program berbasis desa untuk dapat mengetahui kebutuhan data

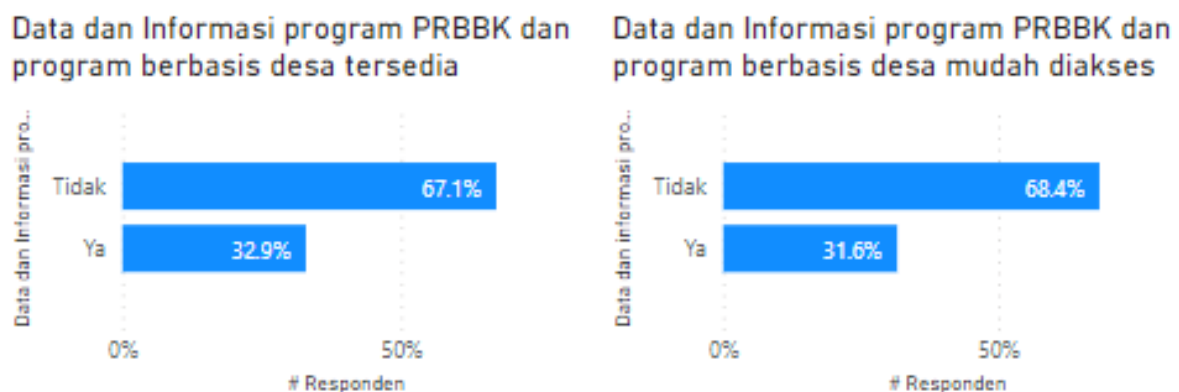
dan informasi program berbasis desa. Dalam proses kegiatan KN PRBBK XIV 2021 telah dipetakan berbagai jenis program Membangun Ketangguhan Masyarakat terhadap bencana dan perubahan iklim, yang telah dan sedang dilaksanakan oleh NGO/INGO, Universitas dan Komunitas. Ada 73 jenis program PRBBK dengan berbagai pendekatan di 117 Desa, 19 Kecamatan, 58 Kabupaten/Kota dan 17 Provinsi, info lengkap dapat dilihat dari link <https://bit.ly/dashboardKNPRBBK2021>.



Gambar 13. Pemetaan program PRBBK di Indonesia yang dilaksanakan oleh organisasi dan komunitas di Indonesia dalam pendataan yang dilaksanakan pada saat KN PRBBK XIV 2021

Hasil survey menunjukkan bahwa masyarakat tidak bisa mendapatkan data dan informasi tentang program-program berbasis desa yang relevan dengan PRBBK. 67,1% menyatakan tidak tersedianya data dan informasi program berbasis desa, 32,9% menyatakan dapat mengakses data dan informasi, pada umumnya adalah para pelaku program yang terhubung dengan pemerintah daerah, universitas dan NGO/INGO yang memang memiliki basis program di desa. 68% responden menyatakan Data dan Informasi program berbasis desa susah diakses, dan 31,6% menyatakan dapat diakses. Hal ini menjadikan persoalan ketika banyak program berbasis desa dikembangkan oleh berbagai organisasi, K/L yang secara output dapat dilihat tapi hasil pembelajaran dan evidence hanya bisa didapatkan apabila ada publikasi-publikasi di dalam seminar, workshop, webinar. Data dan informasi ini dapat menjadi rujukan bagi semua pihak dalam pengambilan keputusan dan pengembangan program berbasis desa

yang dapat dikontribusikan dari berbagai program sebagai salah satu upaya membangun ketangguhan masyarakat di tingkat desa.



Gambar 14. Survey Ketersediaan dan kemudahan akses data dan informasi program-program PRBBK

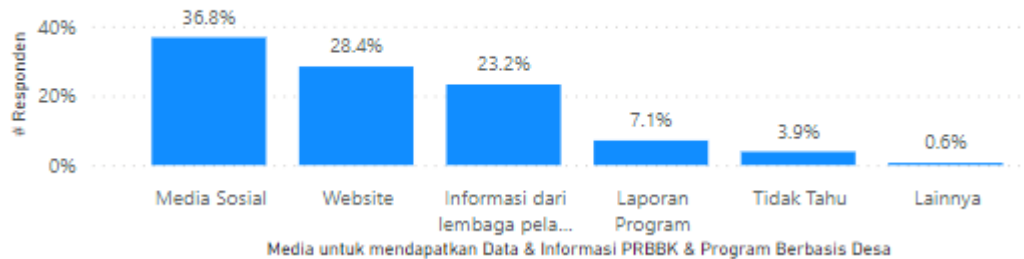
Dalam proses FGD dan KN PRBBK XIV 2021, data dan informasi ini menjadi isu yang didiskusikan dalam proses refleksi-refleksi region, karena data dan informasi sangat penting untuk digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan terkait dengan pengembangan program berbasis desa. Banyak program-program di desa yang sudah dilaksanakan tapi tidak semua organisasi, K/L dan komunitas mengetahui program-program yang telah dilaksanakan, hasil yang sudah dicapai, pembelajaran dan dokumentasi praktek baik yang bisa dijadikan rujukan. Perjalanan PRBBK di Indonesia adanya keberagaman yang mempertimbangkan budaya lokal dalam setiap gerakan. Bappenas, 2020 kemudian membagi dalam karakteristik kewilayahan yang berbeda berdasarkan region atau pulau, namun dalam melihat kompleksitasnya keberagamannya akan semakin banyak di setiap wilayah Kabupaten/Kota. Keberlanjutan PRBBK, yang dituangkan dalam program berbasis desa ada tiga komponen yang harus diperhatikan, yaitu: efektifitas, partisipasi, dan kesetaraan. Kunci keberhasilan program berbasis desa antara lain :

1. Melalui pemberdayaan masyarakat yang komprehensif;
2. Dukungan dari internal dan eksternal dalam membangun kebijakan dan kelembagaan program berbasis desa dalam PRBBK;
3. Kebijakan yang mendukung dan memberi ruang pengoptimalan nilai-nilai lokal dalam PRB; dan
4. Beranjak dari kebutuhan komunitas yang dijadikan sebagai titik balik untuk menjadi sebuah gerakan masyarakat.

Program PRBBK secara spesifik telah dilembagakan ke dalam sebuah program Desa Tangguh Bencana (Destana), namun sejatinya Destana adalah menemukan ketangguhan yang sudah

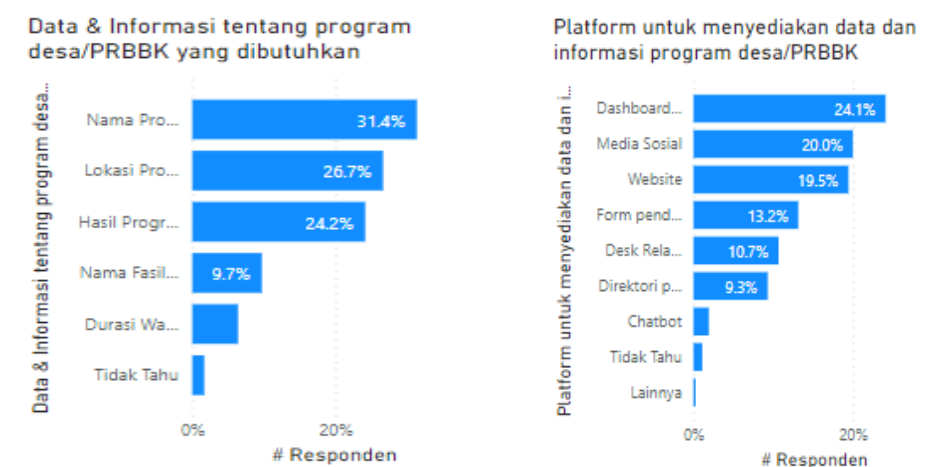
dipunyai oleh masyarakat, lalu menjaganya, dan menyebarkan informasinya kepada seluruh masyarakat, sehingga ketangguhan tersebut bisa tetap terjaga dan terpelihara. Dalam membangun ketangguhan masyarakat dapat dikontribusikan dari berbagai sektor, dan perlu ada standart yang dapat dijadikan acuan bagi desa/komunitas untuk mengukur tingkat ketangguhan komunitas, ini dapat secara langsung dilihat pada saat suatu komunitas yang berada di Kawasan rawan bencana, mengalami dampak bencana, tapi dari sisi lain data dan informasi tentang ketangguhan dapat digunakan menjadi acuan bagi desa dan komunitas untuk dapat beradaptasi dan memiliki kesiapsiagaan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan komunitas. Data dan informasi program berbasis desa menjadi penting dimana data akan menjadi sumber informasi, yang dapat menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat. Berdasarkan hasil refleksi, FGD dan survey yang dilakukan dalam kajian ini, muncul kebutuhan untuk menyediakan platform yang dapat menyediakan informasi terkait dengan lokasi distribusi program berbasis desa yang ada di Indonesia, informasi sumberdaya fasilitator, organisasi/lembaga yang bekerja di desa untuk program PRBBK, dokumentasi praktek baik PRBBK dari berbagai pihak (pentahelix) dan penilaian ketangguhan desa/kelurahan untuk dapat digunakan sebagai bahan dalam pengembangan program. Data dan informasi perlu diwadahi dalam satu platform yang terintegrasi di dalamnya, sehingga dapat diakses siapapun dan semua pihak yang telah melaksanakan programnya memberikan datanya secara mandiri dalam sebuah Katalog PRBBK yang bisa dikontribusikan dari program berbasis desa. Kebutuhan data dan informasi dapat menunjang kebijakan-kebijakan operasional untuk dapat memberikan input dalam pengembangan program-program berbasis desa, atau dapat menjadi bagian dari sistem informasi desa yang terus berinovasi. Media sosial dapat dijadikan alternative untuk dijadikan platform untuk mendesiminasikan informasi PRBBK di Indonesia, namun segala informasi harus dibangun sebuah rumah besar yang dapat mengintegrasikan seluruh data dan informasi melalui website yang dapat diakses oleh siapa saja. Berdasarkan hasil survey, media yang paling mudah digunakan untuk dapat mendistribusikan data dan informasi adalah media sosial yang terkait dengan program-program berbasis desa, website yang menjadi pusat visualisasi data dan informasi, informasi dan publikasi dari organisasi/komunitas melaksanakan kegiatan PRBBK atau laporan program yang dipublikasikan, namun seringkali laporan ini memiliki akses yang terbatas dan hanya bisa diakses oleh kalangan tertentu karena merupakan dokumen yang terbatas.

Media paling mudah bagi anda untuk mendapatkan data dan informasi program PRBBK dan program berbasis desa di Indonesia



Gambar 15. Media yang paling mudah digunakan sebagai akses untuk mendapatkan data dan informasi

Data dan informasi yang sangat dibutuhkan adalah nama program, lokasi program, hasil pelaksanaan program, nama fasilitator, dan durasi lamanya waktu program. Data ini sangat dibutuhkan untuk mengetahui mana wilayah-wilayah yang masuk di dalam Kawasan rawan bencana belum dilaksanakan program. Bentuk data dan informasi yang dibutuhkan kebanyakan responden menyatakan butuh ada dashboard visualisasi data dan informasi, informasi dapat diakses di media sosial dan website. Selain itu juga ada yang menyarankan adanya form pendataan yang dapat digunakan oleh desa atau komunitas yang bisa mengupdate secara langsung data program berbasis desa. Direktori PRBBK juga dibutuhkan untuk dapat mengetahui pelaku PRBBK baik organisasi atau komunitas yang melaksanakan program-program PRBBK, selain itu dengan mekanisme komunikasi yang masif perlu mengembangkan model chatboat untuk dapat mendesiminasikan data dan informasi PRBBK di Indonesia melalui whatsapp, telegram, sms yang dapat terhubung dengan database PRBBK Indonesia.



Gambar 16. Hasil survey tentang kebutuhan data dan informasi dan platform yang bisa digunakan untuk menyediakan data dan informasi PRBBK

KERTAS POSISI KEBIJAKAN/REKOMENDASI

Kertas posisi ini adalah hasil sintesa dan analisis dari kajian bijakan yang kemudian di evaluasi melalui proses refleksi di 20 wilayah. Hasil sintesa dari temuan-temuan di wilayah dibawa ke dalam KN PRBBK XIV 2021, dengan agenda utama adalah melaksanakan Sidang Komite dan Pleno yang menghadirkan narasumber dari Universitas, K/L, INGO, NGO, Media dan komunitas yang merepresentasikan 9 region atau pulau di seluruh Indonesia (Sumatera, Jawa, Bali, NTB, NTT, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan Papua) untuk merumuskan temuan-temuan kunci yang direfleksikan untuk di diskusikan dan melakukan triangulasi yang mengkonfirmasi berbagai sumber. Tiga isu utama yang menjadi bahasan dalam sidang komisi dan pleno yang melibatkan secara akumulatif lebih dari 8,000 peserta dari seluruh wilayah Indonesia yang terdiri dari unsur masyarakat umum, komunitas, relawan, organisasi masyarakat sipil termasuk organisasi penyandang disabilitas, lembaga berbasis agama/keyakinan, pemerintah, entitas swasta, media massa, dan akademisi. Pembahasan sidang komite bertujuan untuk merumuskan satu kertas posisi kebijakan yang akan menjadi bahan untuk membangun peta jalan PRBBK di Indonesia. Fokus pembahasan sidang Pleno adalah :

1. Tata Kelola PRBBK: Kebijakan Operasional, Mekanisme Pendanaan, dan Pelembagaan PRBBK

Tata Kelola PRBBK di Indonesia mulai dari kebijakan operasional, mekanisme pendanaan dan pelembagaan PRBBK. Dalam diskusi pleno 1 diidentifikasi berbagai kebijakan yang dapat mendukung PRBBK di desa dan komunitas, yang berkaitan dengan program berbasis desa yang memiliki lokus di desa dari berbagai kementerian dan lembaga. Secara operasional kebijakan-kebijakan yang ada telah memberi ruang dalam mengimplementasikan PRBBK melalui program desa dan dana desa. Tantangan yang dihadapi adalah banyaknya program dari berbagai kementerian sehingga membuat desa memiliki beban yang berat untuk melaksanakan semua program, karena tidak ada sinkronisasi antara satu program dengan yang lain. Disisi lain, ada peluang untuk melakukan sinkronisasi antar semua program yang di implementasikan di desa, karena sudah ada panduan/dasar hukum untuk mengintegrasikan program. Untuk bisa mencapai tujuan besar tersebut, harus ada kesepahaman antara semua stakeholder baik di tingkat desa sampai tingkat yang lebih atas. Pada tingkat terbawah harus didukung oleh kebijakan di daerah atau Peraturan Daerah (Perda) yang dapat menjembatani

program-program berbasis desa, karena desa sangat tergantung kepada pemerintah daerah sebagai pengampu di daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Program PRB sangat mungkin untuk masuk dan diintegrasikan dalam program-program yang dilaksanakan oleh lembaga/kementerian lain dengan memanfaatkan sumber pendanaan di tingkat desa. Selain itu perlu adanya peningkatan kapasitas terhadap pemerintah daerah dan aparat pemerintah desa. Isu desentralisasi PRB di tingkat desa cukup menarik dibahas adalah bagaimana pemerintah di tingkat kota/kabupaten mendukung desa untuk bisa mengoptimalkan upaya PRB di desa.

2. Model Ketangguhan, Strategi Perluasan termasuk di dalamnya replikasi, modifikasi, inovasi, dan kolaborasi.

PRBBK adalah gerakan dalam masyarakat untuk membangun kepedulian dalam mengurangi risiko bencana. Tujuan PRBBK adalah menyadarkan masyarakat bahwa mereka berada di daerah rawan bencana, dengan adanya kesadaran tersebut harapannya masyarakat lebih aktif dalam aktivitas membangun kesiapsiagaan. Karena masyarakat adalah *first responder* ketika ada kejadian bencana, sehingga kesiapsiagaan harus dimulai dari masyarakat itu sendiri. Berbicara tentang replikasi, substansinya adalah menyadarkan masyarakat bahwa mereka tinggal di daerah rawan bencana, maka masyarakat harus mengembangkan pola PRB sesuai dengan kearifan lokal mereka dalam menghadapi risiko bencana. Replikasi yang dilakukan selama ini terus dikembangkan dengan berbagai inovasi. Sebagai contoh, pendekatan di komunitas Merapi yang sudah dianggap berhasil, namun pada kenyataannya ada ketidakselarasan dengan pemerintah. Belajar dari kondisi ini, saat replikasi di lokasi lain pendekatannya dikembangkan secara berbeda, yaitu melibatkan pemerintah dari awal. Kritik untuk program Destana, kenapa desa yang ditangguhkan, kenapa bukan kawasan yang ditangguhkan? Karena berbicara bencana akan berbicara kawasan. upaya PRB harus berbasis kawasan dan diharapkan setiap wilayah dapat saling koordinasi dan kolaborasi dalam PRB. Inovasi bermakna PRBBK harus terus berkembang dan ada pembaharuan. Sebagai contoh, isu bencana saat ini bukan isu tunggal, dalam satu waktu dapat terjadi lebih dari satu jenis bencana yang berbeda, oleh sebab itu, isu inovasi harus terus dikembangkan, jika tidak maka model/metode PRBBK kita akan ketinggalan. Koordinasi bukan sekedar memperebutkan sumber daya, koordinasi adalah suatu hal yang sangat penting, karena jika proses koordinasi tidak berjalan dengan baik, proses penanggulangan bencana akan *chaos*. Koordinasi tidak

hanya penting bagi pelaku PRB saja, namun juga bagi donor. Jika upaya ini tidak dilakukan dengan baik, akan terjadi tumpang tindih aktivitas dan hanya akan menyianyikan sumber daya yang ada. Untuk membangun kemitraan yang baik adalah dengan mengurangi ego sentris kelembagaan. Kemitraan dapat dibangun antar organisasi masyarakat sipil/*civil society organization* (CSO), kemitraan CSO dengan pemerintah, dan CSO dengan donor. Catatan penting kemitraan CSO dengan pemerintah harapannya tidak sekedar satu atau dua kali pertemuan bersama, sehingga esensi kemitraan tidak berjalan. CSO tidak hanya sekedar ditempelkan dan menjadi klaim bahwa pemerintah sudah bermitra dengan masyarakat melalui CSO. Pendekatan PRBBK ini juga beraneka ragam dan bisa jadi semua pendekatan tersebut benar. Beberapa varian PRBBK di Indonesia antara lain waktu, pelaku, hubungan, partisipasi, ruang, isu, alat atau tools, dan sumberdaya. Setiap kelompok/komunitas mempunyai varian yang berbeda-beda dan bisa jadi semua benar, selama tidak lepas dari substansi PRBBK itu sendiri yaitu bersifat *bottom-up*, melibatkan masyarakat secara partisipatif, dan melindungi masyarakat dengan berbagai aset yang dimiliki.

3. Monitoring Evaluasi PRBBK di Indonesia: Kontrol Kualitas, Penguatan Gerakan/program PRBBK, Kemandirian dan Keberlanjutan

Catatan penting dalam perjalanan PRBBK adalah dengan mengakomodir keberagaman dengan mempertimbangkan kebudayaan dan kebijakan lokal, berdasarkan hasil diskusi di wilayah, ditemukan kondisi bahwa kegiatan PRBBK belum mengakomodir kultur dan budaya di seluruh wilayah di Indonesia. Sintesa dari diskusi refleksi di wilayah-wilayah adalah : (1) Pengintegrasian pendidikan bencana dengan aspek *livelihood*; (2) Pelibatan aktif perempuan secara formal; (3) Pengakuan budaya lokal; (4) Penguatan modal sosial; (5) Peran relawan belum mendapatkan dukungan yang optimal serta komitmen pemegang otoritas; (6) Pengintegrasian kemampuan sumber daya alam melalui aktivitas ekonomi komunitas yang tinggal di kawasan rawan bencana; (7) Regenerasi dan kaderisasi; (8) Alat pendukung aksi-aksi komunitas masih terbatas; (9) Dibutuhkan dukungan pihak eksternal; (10) Perubahan paradigma sebagai korban yang harus dibantu; (11) Proses-proses intervensi yang memberdayakan masyarakat dan mengubah pola pikir sebagai pelaku pembangun ketangguhan. Berbicara keberlanjutan PRBBK, ada tiga komponen yang harus diperhatikan, yaitu: efektifitas, partisipasi, dan kesetaraan. pantauan kualitas dan inklusi tidak lepas dari proses monitoring dan evaluasi. Program nasional Destana BNPB sesuai

Perka BNPB No. 1 Tahun 2012. Strategi PRBBK sesuai John Twigg 2007 dalam buku Pengalaman Indonesia Membangun Ketangguhan Masyarakat: tata kelola, pengkajian risiko bencana, pengetahuan dan pendidikan, manajemen dan pengurangan kerentanan, dan kesiapsiagaan dan tanggap bencana. Instrumen monitoring menggunakan (1) Perka BNPB No. 1 Tahun 2021 ada 16 prinsip dan 20 indikator; (2) SNI 8357-2017 tentang desa dan kelurahan tangguh; (3) Penilaian Ketangguhan Desa (PKD), Tahun 2021; dan (4) Permendagri 101/2019: Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub-urusan Bencana. Inklusifitas dalam PRBBK banyak mengacu pada *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction*/Kerangka Aksi Sendai dalam Pengurangan Risiko Bencana (*SFDRR*). Catatannya adalah, inklusifitas ini sebaiknya tidak hanya merangkul anak muda, perempuan, dan anak-anak, namun juga lansia dan *indigenous people*, serta kelompok migran. Praktik baik inklusifitas PRBBK yang sudah ada di Indonesia antara lain pelibatan anak muda dalam PRB. Adapun catatan penting yang muncul selama diskusi di wilayah dan dituangkan dalam kertas pleno #3 Pantauan kualitas dan inklusi dalam PRBBK:

1. *Empowering* inisiatif dari komunitas.
2. Gotong royong pentahelix menjadi kunci.
3. Perlunya *tools* monitoring partisipatif yang mudah dijangkau dan diisi oleh masyarakat (<http://www.aksikomunitas.id>).
4. Perlu mendorong *knowledge management* dan *knowledge production* dalam tingkat lokal secara partisipatif dan integrasi kearifan lokal, teknologi, serta pengetahuan modern.
5. Perlu mendorong aspek investasi ketangguhan infrastruktur untuk menjamin keselamatan masyarakat
6. Perlu mendorong *training of facilitator* secara rutin dan berkelanjutan untuk memberikan efek domino di daerah.
7. Perlu mendorong kapasitas dalam pengambilan keputusan.
8. Perlu mendorong kapasitas 7 objek ketangguhan.
9. Akselerasi PRBBK Inklusi dengan semangat ilmu pengetahuan, rekayasa, teknologi, dan inovasi.
10. Kolaborasi, mobilisasi sumber daya (manusia, sarana, prasarana, dan pendanaan)

Hasil temuan-temuan dalam sidang pleno KN PRBBK XIV 2021 mengemukakan kebutuhan untuk melakukan penguatan dalam beberapa aspek yang akan menjadi perhatian semua pihak pentahelix, untuk dapat membangun gerakan PRBBK yang lebih masif antara lain : (1) Tata Kelola, (2) Praktik, dan (3) Kualitas PRBBK di Indonesia agar terwujudnya kedaulatan,

kebermanfaatan, kemandirian, keberlanjutan, dan penyebarluasan praktek-praktek PRBBK di Indonesia, khususnya wilayah yang rawan terhadap ancaman dan bencana.

Untuk mewujudkan komitmen tersebut, kami mengajak semua pihak agar dapat melakukan upaya-upaya berikut yang mencakup tiga aspek di atas antara lain :

I. Penguatan Tata Kelola PRBBK:

- 1) Mendorong dan memastikan harmonisasi dan sinergitas kebijakan perencanaan dan penganggaran terkait program PRBBK dari level nasional, daerah, dan desa atau kelurahan. Proses harmonisasi kebijakan ini digunakan sebagai acuan koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan dari berbagai ragam sektor pembangunan agar terintegrasi sebagai kesatuan agenda pembangunan.
- 2) Menyusun kebijakan dan menerapkan praktik PRBBK yang inklusif dan secara substansi dapat diimplementasikan untuk menjawab kebutuhan dan keberpihakan terhadap kelompok rentan dan/ atau berisiko tinggi termasuk didalamnya anak-anak, perempuan, kelompok disabilitas, masyarakat adat, kelompok lanjut usia, dan kelompok minoritas yang cenderung terpinggirkan.
- 3) Mendorong agar kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan program PRBBK oleh para pelaku pembangunan menguatkan kearifan lokal, modal sosial, serta sosial-budaya masyarakat yang sejalan dengan ketangguhan bencana. Sepatutnya praktek dan pendekatan PRBBK mendukung, menguatkan, dan sejalan dengan nilai-nilai sosial budaya serta visi pembangunan masyarakat.
- 4) Melakukan advokasi kepada para pelaku pembangunan terhadap perluasan PRBBK di Indonesia, secara khusus mendorong komitmen kepala daerah melakukan perluasan PRBBK dengan membuat kebijakan untuk optimalisasi sumber-sumber pendanaan² dan sumberdaya yang dimiliki masyarakat di wilayahnya.
- 5) Melakukan peningkatan dan penguatan kapasitas kepada para pimpinan daerah, khususnya ditingkat desa/kelurahan untuk memiliki perspektif PRBBK dan kemampuan mengintegrasikannya kedalam program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah administrasi kerjanya.

² Untuk itu perlu dipahami semua pihak bahwa peluang pembiayaan PRBBK di tingkat daerah tidak hanya terpaku pada Dana Desa saja, namun masih terdapat skema Alokasi Dana Daerah (ADD), Dana bagi hasil, dan bantuan provinsi serta dari Kerjasama Multipihak.

- 6) Mendorong dan mengembangkan ketangguhan melalui pendekatan kawasan. Tata kelola kolaboratif menjadi strategi koordinasi dan komunikasi serta pelibatan berbagai pihak untuk penguatan PRBBK dalam satu kawasan rawan bencana³.
- 7) Mendorong penyusunan dan implementasi rencana tata ruang yang menerapkan prinsip-prinsip PRBBK dalam menjawab kebutuhan penataan ruang di wilayah rawan bencana.
- 8) Mendorong adanya kebijakan baik level nasional, daerah, dan desa atau kelurahan yang dapat mendukung pelaksanaan program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) baik formal maupun non-formal⁴ serta pendidikan informal⁵ dalam program PRBBK, baik dari aspek koordinasi, keterkaitan sistem mitigasi dan kesiapsiagaan, perencanaan pengurangan risiko, dan dukungan pembiayaan.
- 9) Mendorong kemudahan akses informasi risiko dan kapasitas desa atau kelurahan oleh semua pihak. Ketersediaan data ini diperlukan sebagai dasar menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan.

II. Pemutakhiran Praktek dan Kemitraan PRBBK yang kuat

- 10) Mengintegrasikan risiko-risiko bencana secara holistik, termasuk perubahan iklim, degradasi lingkungan penanganan pandemi, termasuk COVID-19 dan risiko dari ancaman non-alam lainnya kedalam gerakan PRBBK yang berkontribusi membangun kesejahteraan dan memberikan perlindungan sosial
- 11) Melakukan pengintegrasian praktek PRBBK dengan dengan perguruan tinggi, kalangan akademisi, dan para peneliti serta pihak swasta untuk mendorong inovasi dan mendukung perluasan gerakan PRBBK yang bersifat inklusif, empati, dan iteratif serta dapat benar-benar menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada dalam masyarakat, menjangkau ragam masyarakat di seluruh wilayah Indonesia

³ Dalam hal ini skema Kerjasama administrasi yang memiliki kesatuan bentangalam dan masuk dalam kawasan rawan bencana menjadi prioritas.

⁴ Terdapat banyak kelompok belajar atau entitas pendidikan yang informal dimasyarakat. Kelompok-kelompok ini berpotensi untuk pengintegrasian antar pendidikan dan PRBBK dalam sebuah kawasan rawan bencana.

⁵ pendidikan informal seperti di tingkat desa, keluarga, dan kelompok lainnya yg diluar institusi formal dan non formal

- 12) Melakukan pendokumentasian pengetahuan lokal secara partisipatif terkait karakter dan sejarah kebencanaan, potensi ancaman, dan model ketangguhan komunitas sebagai proses produksi pengetahuan PRBBK di Indonesia yang lebih kontekstual dan relevan.
- 13) Melakukan regenerasi pengetahuan dan keterampilan PRBBK di Indonesia melalui perluasan literasi, demokratisasi pengetahuan kebencanaan, dan optimasi peran institusi pendidikan. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses produksi dan pengelolaan pengetahuan termasuk didalamnya anak-anak, kaum muda, dan kelompok lanjut usia dengan mendukung pengembangan pengetahuan inter-generasi yang inklusif dengan mempertimbangkan gender dan status disabilitas.
- 14) Mendorong implementasi kebijakan Sistem Peringatan Dini Bencana (SPDB) dari hulu ke hilir yang optimal. Tidak hanya terfokus pada aspek pantauan ancaman, namun juga memperhatikan aspek-aspek pengetahuan risiko, diseminasi dan komunikasi informasi peringatan, serta penguatan kapasitas dalam merespon peringatan bencana oleh masyarakat yang tinggal dalam kawasan rawan bencana. SPDB harus sejalan dan memperhatikan aspek-aspek modalitas pengetahuan dan budaya masyarakat lokal dimana komunitas dan pemegang mandat dapat berjalan serta berfungsi optimal dalam meningkatkan kesiapsiagaan. Dalam proses pengembangannya pelibatan masyarakat, pemanfaatan kapasitas dan rantai-jaring komunikasi masyarakat lokal perlu diselaraskan dengan sistem peringatan dini yang dikembangkan.
- 15) Melakukan kolaborasi yang inklusif, dan saling menguatkan fungsi, peran, kontribusi dan keterlibatan berbagai aktor dalam penguatan PRBBK. Sepatutnya dengan adanya kolaborasi yang inklusif tidak menghilangkan atau melemahkan kapasitas yang telah ada sebelumnya. Sebaliknya membuka peluang program-program baru, pendanaan baru, serta inovasi.

III. Peningkatan mutu kualitas PRBBK yang berkelanjutan

- 16) Menjamin terjadinya proses pengawasan program-program PRBBK sehingga dapat meningkatkan ketangguhan masyarakat secara berkelanjutan dan memperkuat hubungan dan modal sosial yang sebelumnya telah terbangun di masyarakat.

- 17) Melakukan peningkatan kapasitas masyarakat dan para pihak serta membangun mekanisme umpan balik yang inklusif, sehingga mampu menghindari terjadinya kesenjangan antara kebijakan dan implementasi.
- 18) Mengembangkan indikator capaian Program PRBBK⁶ sehingga meliputi elemen pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan, pemetaan kualitas, dan juga memperhatikan aspek aset penghidupan yang disasar, dan pendistribusian program berdasarkan potensi tingkat ancaman bencana sehingga skala prioritas dapat ditentukan secara akurat.
- 19) Mendorong agar setiap program kebencanaan mengedepankan paradigma kesadaran kritis, sehingga masyarakat termasuk kelompok rentan dan berisiko tinggi dapat mengembangkan potensi dirinya sebagai pelaku pembangunan ketangguhan melalui PRBBK.
- 20) Memperkuat kebijakan, koordinasi dan pengembangan kapasitas pentahelix (masyarakat, pemerintah, pelaku usaha, jurnalis, perguruan tinggi) yang berpusat pada kebutuhan masyarakat.
- 21) Pengintegrasian PRBBK dalam sektor strategis, seperti: pendidikan; perlindungan & pengungsian; logistic; sarpras; penyelamatan dan pertolongan; pemulihan dini; ekonomi; dan kesehatan, serta mendorong kepemimpinan lokal.
- 22) Adanya pedoman kajian desa komprehensif yang dapat dilakukan secara mandiri, sehingga terpetakan aktor, akses, kapasitas, kebijakan dalam upaya meningkatkan kemampuan masyarakat dalam melakukan PRBBK.
- 23) Melakukan pengorganisasian, peningkatan kapasitas, dan penguatan jejaring relawan secara sistematis dan terstruktur, serta melibatkan badan usaha, media, dan universitas untuk terlibat aktif dalam memajukan ketangguhan masyarakat dan menjadi bagian dalam pengurangan risiko bencana. Mendorong pengakuan, dukungan, dan komitmen pemerintah daerah terhadap relawan dalam kegiatannya mendukung gerakan PRBBK
- 24) Mendorong pengembangan sistem informasi PRBBK yang inklusif dan partisipatif yang dapat diakses oleh semua pihak. Informasi ini diharapkan menjadi alat koordinasi, referensi bersama, dan basis untuk pengambilan keputusan dalam proses perencanaan,

⁶ Termasuk didalamnya adalah Destana, Proklim, Kampung Siaga Bencana, SIBAT, dan program lainnya yang serupa.

penyusunan, implementasi, dan monitoring PRBBK yang terintegrasi dengan seluruh sektor pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Barnett, J. (2010). Adapting to climate change: three key challenges for research and policy—an editorial essay. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change*, 1(3), 314-317.
- Bas Arts, Marleen Buizer, et al, 2017. Landscapes Approaches. A State of The Art Review. Annual Review of Environment and Resources. Vol. 42:439-463 (Volume publication date October 2017) First published online as a Review in Advance on August 23, 2017
- Folke, 2006. Resilience, vulnerability, and adaptation: A cross-cutting theme of the International Human Dimensions Programme on Global Environmental Change
- Jordan and J. Turpeny, 2015. The Tools of Policy Formulation: New Perspectives and New Challenges. Chapter: 13_the tools of policy formulation_new perspectives and new challenges Publisher: Edward Elgar Editors: Andy Jordan and John Turnpenny
- Nugroho dan Men Yon, 2011. Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas di Indonesia: Gerakan, Pelembagaan dan Keberlanjutan. Pulish oleh Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia, 2011.
- Paripurno, Lassa, N.M Jaanah, P. Pujiono, Magatani, C. Sudiro and H. Parlan, 2014. Buku Panduan Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas. Edisi 2014.
- Peraturan Menteri Dalam Negri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal No 7 Tahun 2021 tentang Perioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
- Peraturan Menteri Dalam Negri No 90 Tahun 2018 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- SNI : 8357-2017 Desa & Kelurahan Tangguh Bencana
- Tom Mitchell, M. V. A., Paula Silva Villanueva. (2010). *“Assesing Progress on Integrating Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation in Development Processes”*.
- Undang-undang No 24 Tahun 2007. Penanggulangan Bencana
- Undang-undang No 6 Tahun 2004 tentang Desa
- Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- UNISDR, 2014. Annual Report 2014. United Nations Office For Disaster Risk Reduction 2014